

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**EVALUASI DAMPAK PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)  
DIKELURAHAN DURI BARAT KECAMATAN MANDAU KABUPATEN  
BENGKALIS**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau*

**ROVI OCTAVIA**

**NPM : 177110059**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**PEKANBARU**

**2022**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIA DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Rovi Octavia  
NPM : 177110059  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. I)  
Judul Skripsi : Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh  
(kotaku) DiKelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau  
Kabupaten Bengkalis

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dan sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi syarat ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta disetujui untuk diuji dalam sidang komprehensif.

Turut Menyetujui:

Pekanbaru, 07 Maret 2022

Program Studi Administrasi Publik

Pembimbing

  
Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

  
Kartius, S.Sos., M.AP

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIA DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Rovi Octavia  
NPM : 177110059  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh  
(kotaku) DiKelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau  
Kabupaten Bengkalis


Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah oleh karena itu tim penguji komprehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Srata Satu Bidang Ilmu-Ilmu Sosial.

Pekanbaru, 27 Juli 2022

Ketua

Sekretaris

  
**Kartius, S.Sos., M.AP**

  
**Eko Handrian, S.Sos., M.Si**

Anggota

  
**Dr. Evi Zubaidah, S.Sos.I.MPA**

Mengetahui  
Wakil Dekan I

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 0578/UIR-FS/KPTS/2022**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Rovi Octavia  
N P M : 177110059  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.**

**Struktur Tim :**

- |                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Kartius, S.Sos., M.Si         | Sebagai Ketua merangkap Penguji      |
| 2. Eko Handrian, S.Sos., M.Si    | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Evi Zubaidah, S.Sos.I.MPA | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
| 4. Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si | Sebagai Notulen                      |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 07 Juli 2022  
Dekan,

**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si**  
NPK. 080102337

**Tembusan Disampaikan Kepada :**

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi .....
4. Arsip -----sk.penguji-----

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

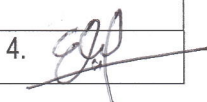
=====

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 0578/UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 06 Juli 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 07 Juli 2022 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Rovi Octavia  
NPM : 177110059  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.**

Nilai Ujian : Angka : " 83 " ; Huruf : " A<sup>-</sup> "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Kartius, S.Sos., M.Si	Ketua	1. 
2.	Eko Handrian, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Evi Zubaidah, S.Sos.I.MPA	Anggota	3. 
4.	Emma Fitri Lubis, S.Sos., M.Si	Notulen	4. 

Pekanbaru, 07 Juli 2022  
An. Dekan

  
**Indra Safri, S.Sos, M.Si**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Rovi Octavia  
NPM : 177110059  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)  
DiKelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan korektif dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 28 Juli 2022

An. Tim Penguji

Sekretaris

Ketua

  
Kartius, S.Sos., M.AP

  
Eko Hartdrian, S.Sos., M.Si

Mengetahui,  
Wakil Dekan 1

  
Indra Safri, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui  
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik

  
Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah Nya serta nikmatbislam yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Usulan Penelitian yang berjudul “**Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) DiKelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis**”

Kemudian Shalawat dan Salam penulis haturkan untuk junjungan alam Baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli’ala saidina Muhammad Wa’ala ali tsayyidina Muhammad, Assalamu’alaika Ya Rasulullah. Yang telah memberikan suri tauladan serta pengajarannya, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan nasehat dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan Usulan Penelitian ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL yang telah menyediakan fasilitas yang membuat belajar menjadi nyaman dan selalu menjadi motivator untuk menyelesaikan studi.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menjadi motivator penulis untuk menyelesaikan studi.

3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang selalu turut memberikan pengarahan kepada penulis dan membimbing penulis dalam menyelesaikan susunan skripsi ini.
4. Bapak Eko Handrian, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik, yang juga turut memberikan motivasi membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Kartius, S.Sos., M.AP Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktu dan fikirannya sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu selama mengikuti perkuliahan pada Program Studi Administrasi Publik.
7. Seluruh Staff, Karyawan/karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Kepala Bapenda dan rekan-rekan yang telah mengizinkan dan memberikan informasi kepada peneliti dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
9. Kepada kedua Orang Tua tercinta yakni Ibunda Ratna Wilis dan Ayahanda Jonaidi yang selalu mendoakan dan tidak pernah lelah memberikan



motivasi dan semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan Skripsi ini.

10. Kepada kakak kandung tercinta Neva Aprila yang selalu memberikan semangat serta motivasinya untuk penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

11. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman dan sahabat saya Nurhidayati, Selvina Rianti, Mita Handayani, Sinta Saradevi dan seperjuangan jurusan Administrasi Publik angkatan 2017 terkhusus kelas APD yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis dapatkan ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa, Bangsa dan dapat menambah khsanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca.

Pekanbaru, 07 Maret 2022  
Penulis

Rovi Octavia

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SK PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	18
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	18
<b>BAB II: STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR .....</b>	<b>20</b>
A. Studi Kepustakaan .....	20
1. Konsep Ilmu Administrasi Publik .....	20
2. Konsep Organisasi Publik .....	23
3. Konsep Manajemen Publik .....	24
4. Konsep Evaluasi Dampak .....	26
5. Kawasan Pemukiman Kumuh .....	29
B. Kerangka Pikir .....	30
C. Konsep Operasional .....	30
D. Operasional Variabel .....	33
<b>BAB III: METEDOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Tipe Penelitian .....	34

B. Lokasi Penelitian .....	34
C. Informan dan Key Informan .....	35
D. Teknik Penetapan Informan .....	36
E. Jenis Dan Sumber Data .....	36
F. Teknik Pengumpulan Data .....	37
G. Teknik Analisis Data .....	37
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	39
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian .....	40
<b>BAB IV: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Sejarah Singkat.....	42
1. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis .....	42
2. Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis.....	46
3. Gambaran Umum Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.....	46
B. Gambaran Umum Kelurahan Duri Barat .....	50
<b>BAB V: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
A. Identitas Responden .....	57
B. Analisis dan Pembahasan Penelitian Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dikelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis .....	59
1. Dampak Kebijakan yang Diharapkan .....	61
2. Dampak Kebijakan yang tidak diharapkan .....	80
C. Faktor-faktor yang Menjadi Penghambat Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dikelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis .....	89
<b>BAB VI: PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran.....	92
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>94</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
Tabel I.1	Ketersediaan Air Bersih.....	10
Tabel I.2	Ketersediaan Septitank Komunal.....	11
Tabel I.3	Ketersediaan Jalan dan Drainase .....	12
Tabel II.1	Operasional Variabel Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) diKelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis .....	33
Tabel III.1	Key Informan.....	36
Tabel III.2	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) DiKelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis .....	39
Tabel IV.1	Luas Kecamatan, Jumlah Penduduk dan Kota Kecamatan Dikabupaten Bengkalis .....	45
Tabel IV.2	Nama Kelurahan/Desa Dikecamatan Mandau .....	48
Tabel IV.3	Sarana dan Prasarana Kecamatan Mandau .....	49
Tabel V.1	Identitas Key Informan Kelurahan Duri Barat.....	57
Tabel V.2	Identitas Informan Masyarakat Terdampak Program Kota Tampak Kumuh (KOTAKU) .....	58

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1. Kerangka Pikir Tentang Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) DiKelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.....	30
III.1. Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif.....	38
IV.1. Struktur Organisasi BKM Karya Maju Bersama Tahun 2018-2021 .....	52
V.I. Kondisi sekarang Jalan dan Drainase .....	80



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Dokumentasi Penelitian Tentang Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (kotaku) di Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis .....	98
2. Daftar Pedoman Wawancara Untuk Kelurahan Duri Barat Penelitian Evaluasi Dampak Proram Kota Tanpa Kumuh (kotaku) di Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.....	103
3. Daftar Wawancara Pedoman Wawancara Untuk Masyarakat Kelurahan Duri Barat Penelitian Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (kotaku) Di Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis .....	109
4. Surat Permohonan Rekomendasi Riset Dari Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik .....	115
5. Surat Rekomendasi Riset Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau .....	116
6. Surat Rekomendasi Riset Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bengkalis .....	117
7. Surat Rekomendasi Riset Dari Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.....	118
8. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Kelurahan Duri Barat.....	119
9. Surat Keputusan Dekan Fisipol Universitas Islam Riau Tentang Penetapan Dosen Pembimbing.....	120
10. Surat Keterangan Jurnal Online .....	121
11. Surat Keterangan Lulus Plagiasi Skripsi.....	122
12. Sertifikat Baca Al-Qur'an .....	123

## PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rovi Octavia  
NPM : 177110059  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (kotaku) DiKelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar dan hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan bukti secara syah bahwa saya melanggar dan belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas persyaratan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatal hasil ujian komprehensif skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 29 Juni 2022

Penulis

  
Rovi Octavia

## Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupten Bengkalis

### ABSTRAK

Oleh

**Rovi Octavia**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak program kota tanpa kumuh (kotaku) di Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara, obeservasi, dokumentasi serta mencatat dan merekam. Dengan menggunakan teori evaluasi dampak menurut Anderson seperti dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Hasil yang peneliti lakukan terhadap Kelurahan Duri Barat bahwa Evaluasi dampak berdasarkan indikator dalam perbandingan kondisi permukiman kumuh menunjukkan aneka ragam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat lokal dan lingkungan permukiman belum sepenuhnya terentaskan. Perubahan yang menonjol adalah pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana dasar terutama jalan lingkungan dan dreinase juga sumur bor dan air bersih, serta belum tuntasnya penanganan semua indikator permukiman kumuh. Program kotaku ini dimana untuk mengatasi masalah permukiman kumuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas permukiman kumuh yang diwujudkan secara menyeluruh. Untuk faktor penghambat masih ada sebagian masyarakat yang kurang menjaga pembangunan yang sudah dilaksanakan. Penulis memberikan saran agar para stakeholder dan masyarakat mengadakan rapat terkait program kota tanpa kumuh (kotaku) pada waktu yang dikiranya memungkinkan untuk seluruh masyarakat sekitarnya, terkait agar dapat hadir dalam mengevaluasi dan menjaga lingkungan sekitarnya agar selalu bersih, semakin asri, nyaman, bebas banjir agar sesuai dengan yang diharapkan.

Kata Kunci: Evaluasi Dampak, Program Kotaku, Duri Barat



## **Evaluation of the Impact of the City Without Slums (Kotaku) Program in Kelurahan West Duri, Mandau District, Bengkalis Regency**

### **ABSTRACT**

**By  
Rovi Octavia**

*This study aims to evaluate the impact of the slum-free city program (kotaku) in Duri Barat Village, Mandau District, Bengkalis Regency. The research was conducted using a qualitative descriptive method. Data collection techniques carried out in this study were interviews, observation, documentation and note-taking and recording. By using the theory of impact evaluation according to Anderson such as the expected impact and the unexpected impact. The results that the researchers carried out on Kelurahan Duri Barat were that the impact evaluation based on indicators in the comparison of slum conditions showed that the various problems faced by local communities and the residential environment had not been completely resolved. The prominent changes are the development of basic infrastructure and facilities, especially environmental roads and drainage as well as boreholes and clean water, as well as the unfinished handling of all indicators of slum settlements. This Kotaku program is aimed at overcoming the problem of slum settlements and improving people's welfare through improving the quality of slum settlements that are realized as a whole. For the inhibiting factor, there are still some people who do not take care of the development that has been implemented. The author suggests that stakeholders and the community hold a meeting related to the city program without slums (kotaku) at a time that they think is possible for all surrounding communities, concerned to be present in evaluating and maintaining the surrounding environment so that it is always clean, more beautiful, comfortable, flood-free so that as expected.*

**Keywords: Impact Evaluation, Kotaku Program, Duri Barat**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Memiliki tempat tinggal serta lingkungan hidup yang baik, layak dan sehat adalah kebutuhan dasar manusia dan juga hak warga Negara Indonesia untuk mencapai kondisi yang sejahtera. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 01 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman di mana kewajiban pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah untuk bertanggung jawab serta melindungi segenap bangsa Indonesia melalui pelaksanaan program-program kebijakan pemerintah tentang perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu memiliki tempat tinggal yang baik serta menempati rumah yang layak. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman kumuh secara berjenjang.

Permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaian, diperlukan kolaborasi beberapa pihak antara pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, pihak swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Pelibatan beberapa pihak secara kolaboratif diharapkan memberikan berbagai dampak positif, antara lain meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pencapaian kota layak huni, meningkatkan rasa

memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan, menjamin keberlanjutan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan swasta terhadap Pemerintah.

Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana publik merupakan salah satu pekerjaan sosial yang telah dilakukan oleh pemerintah, namun pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan yang dikombinasikan dengan kebijakan yang berorientasi pada stabilitas kekuasaan yang telah melahirkan pelaksanaan pembangunan yang bersifat sentralistik dan top down (dari atas kebawah).

Oleh karena itu, sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan platform kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU mendukung Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman layak huni diantaranya melalui revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Permukiman kumuh dipandang sebagai permukiman atau perumahan bagi orang-orang miskin perkotaan yang berpenduduk padat, terdapat dipinggir-pinggir jalan atau lorong-lorong yang kondisinya kotor dan merupakan bagian dari kota secara keseluruhan atau disebut wilayah pencomberan (Suparlan dalam Putro,2011:22). Salah satu penanganan kawasan kumuh adalah melalui kegiatan peningkatan maupun pembangunan prasarana – sarana baru, baik dari segi perumahan maupun kawasan permukiman yang terjangkau dan layak huni.

Suatu kebijakan dan program diimplementasikan atau dilaksanakan maka selalu ada tuntutan evaluasi menyertainya. Sebaik, secepat serta seungguh apapun suatu kebijakan dan program, tidak akan menjadi sempurna tanpa evaluasi. Oleh karena itu antara kebijakan, program dan evaluasi sesungguhnya saling integral dan ketergantungan secara timbal balik. Evaluasi sebagai salah satu unsur dan fungsi manajemen memainkan peran kunci dalam menentukan kesinambungan (continuity) dan keberlanjutan (sustainability) suatu kebijakan dan program, bahkan evaluasi memainkan atau sangat berperan di dalam menilai perencanaan, menentukan hasil dan dampak (output-outcome), kualitas, manfaat, dan efektivitas dari implementasi atau pelaksanaan suatu kebijakan ataupun program khususnya dalam perencanaan wilayah dan kota. Evaluasi program adalah suatu kegiatan yang membutuhkan metode ilmiah untuk mengukur implementasi dan hasil program dengan tujuan untuk membuat keputusan (Rutman dalam Tayibnapis,2000:12). Program harus diakhiri dengan evaluasi, guna memastikan apakah program tersebut berhasil menjalankan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Konsepsi permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan pemukiman).

Berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman

yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Undang-undang ini mengamanahkan bahwa "negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Cakupan kerja penanganan permukiman kumuh dalam Program KOTAKU berdasarkan kondisi kualitas permukiman yang ada dapat dibedakan menjadi tiga pola penanganan, yang mengacu kepada Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu:

1. Pencegahan Tindakan pencegahan kumuh dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru. Tindakan pencegahan meliputi pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat. Pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan (misal: izin prinsip, izin lokasi, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan), 4 Khusus untuk lokasi NUSP-2 di Kab/Kota Terpilih dan siap melaksanakan New Site Development (NSD) - 9 - standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberdayaan dilakukan

terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

2. Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilaksanakan melalui pola-pola penanganan, antara lain pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali (perhatikan ketentuan khusus terkait konsolidasi tanah dan pemukiman kembali pada Kerangka Kerja Pengelolaan Dampak Sosial dan Lingkungan atau dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Sosial).
3. Pengelolaan
  - a. Pengelolaan dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan
  - b. Pengelolaan dilakukan oleh masyarakat secara swadaya
  - c. Pengelolaan oleh masyarakat difasilitasi oleh pemerintah daerah baik dukungan pendanaan untuk pemeliharaan maupun penguatan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan
  - d. Pengelolaan oleh pemerintah daerah dengan berbagai sumber pendanaan.

Aspek yang ditangani mencakup seluruh aspek yang diidentifikasi sebagai gejala dan penyebab kumuh, baik dari aspek sosial, ekonomi, fisik lingkungan, maupun aspek legal yang bertujuan untuk pencapaian visi kota tanpa kumuh.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan

kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan berkelanjutan. Oleh karena itu sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yakni kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan platform kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Di tingkat keluraha/desa, unsur utama pelaksanaan program kotaku adalah Lurah/Kades dan perangkatnya, BKM/LKM dan perangkatnya, dan tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) permukiman, Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) dan Relawan. TIPP dibentuk oleh masyarakat, dan terdiri dari unsur aparat kecamatan, kelurahan/desa, bkm/lkm, relawan, kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan. Relawan adalah pelopor-pelopor penggerak dari masyarakat yang mengabdikan tanpa pamrih, ikhlas, peduli dan memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan.

Program kotaku merupakan program yang sudah dilaksanakan di kota Duri Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kota/kabupaten di 34 provinsi yang menjadi platform atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintahan pusat, provinsi, kota/kabupaten, pihak donor, swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Kotaku bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku

kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengkedepankan partisipasi masyarakat.

Kotaku diharapkan menjadi platform kolaborasi yang mendukung penanganan kawasan pemukiman kumuh seluas 38.431 Ha yang dilakukan secara bertahap diseluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar ditingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu pengentasan pemukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kumuh yang ditetapkan oleh Pemerintah bahwa Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau dikategorikan sebagai wilayah pemukiman kumuh karena kondisi rumah-rumah di Kelurahan ini belum sepenuhnya terlayani dengan fasilitas pelayanan seperti jalan berlubang, tidak terpeliharanya drainase, sistem pengelolaan sampah yang kurang baik sehingga banyak sampah yang berserakan di pinggir saluran drainase. Penetapan program kota tanpa kumuh (KOTAKU) ini di tetapkan melalui SK Bupati Bengkalis salah satunya di Kelurahan Duri Barat yang tingkat kekumuhanya dikategori ringan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Dalam pasal 1 ayat (11) yang berbunyi pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dan ayat (12) berbunyi pemeliharaan



adalah kegiatan menjaga keandalan perumahan dan pemukiman beserta prasarana, sarana dan utilitas umum agar tetap layak fungsi.

Sebagaimana diketahui bahwa Kotaku merupakan program yang menitik beratkan pada peningkatan akses masyarakat dalam infrastruktur dasar, seperti akses air bersih, sanitasi, jalan lingkungan, pengelolaan sampah, dengan cara melakukan sinergi dan pendekatan antara pembangunan dan infrastruktur berbasis masyarakat, penguatan peran pemerintah daerah sebagai “nakhoda” dan menjadikan kolaborasi sebagai platform, yaitu kolaborasi antara Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh dari aspek fisik sebagai berikut :

1. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman
2. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi
3. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khususnya untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut :
  - a. Jalan lingkungan
  - b. Drainase lingkungan
  - c. Penyediaan air bersih/minum
  - d. Pengelolaan persampahan
  - e. Pengelolaan air limbah
  - f. Pengamanan kebakaran
  - g. Bangunan

Karakteristik fisik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator dari gejala kumuh dalam proses identifikasi lokasi perumahan

kumuh dan pemukiman kumuh. Selain karakteristik fisik, karakteristik non fisik pun perlu diidentifikasi guna melengkapi penyebab kumuh dari aspek non fisik seperti perilaku masyarakat, kepastian bermukim, kepastian berusaha dan sebagainya.

Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukaan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Pencapaian tujuan program diukur dengan dirumuskan indikator kinerja keberhasilan target capaian program yang akan berkontribusi terhadap tercapainya sasaran rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Duri Barat dalam program KOTAKU Dari hasil pengumpulan Data di lapangan maka dapat di Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau ini yang di tinjau berdasarkan tabel berikut ini:

1. Ketersediaan Air Bersih

Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktifitas mereka sehari-hari termasuk di antaranya adalah sanitasi. Untuk konsumsi air minum menurut dapertemen di bidang kesehatan sendiri, syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna dan tidak mengandung logam berat.

**Tabel I.1 : Ketersediaan Air Bersih**

Nama lokasi	Unit	Kriteria
RT001/RW004	1	Ketersediaan akses
RT001/RW0011	1	Tidak terpenuhinya akses
RT002/RW0011	1	Ketersediaan akses
RT003/RW003	1	Tidak terpenuhinya akses
RT003/RW004	1	Ketersediaan akses
RT003/RW009	1	Tidak terpenuhinya akses
RT004/RW004	1	Tidak terpenuhinya akses
RT004/RW005	1	Ketersediaan akses
RT005/RW002	1	Tidak terpenuhinya akses
RT007/RW008	1	Ketersediaan akses
Jumlah	10	

Sumber : pedoman umum program (kotaku)

Berdasarkan Tabel di atas diketahui pelaksanaan program KOTAKU pada kegiatan penyediaan air bersih beserta fasilitas yaitu pembuatan sumur bor di Kelurahan Duri Barat yang sesuai dengan indikator ketercapaian penyediaan air bersih. Berdasarkan akses air aman yang harus memiliki kualitas air yang tidak berasa, tidak berwarna dan tidak berbau yaitu disemua RT/RW sudah dapat mengakses air bersih dengan aman, berdasarkan kebutuhan air minimal 60 liter/hari/orang disemua RW sudah memenuhi dan mencukupi kebutuhan air bersih per orangnya.

## 2. Ketersediaan Kamar Mandi MCK Umum

MCK dari Mandi, Cuci, Kakus adalah salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci,

dan membuang air dilokasi permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomi rendah.

**Tabel I.2 Ketersediaan Septitank Komunal**

Nama Lokasi	Unit	Kriteria
RT004/RW005	1	Prasarana dan sarana
Jumlah	1	

*Sumber : pedoman umum program (kotaku)*

Berdasarkan Tabel di atas diketahui pelaksanaan program KOTAKU pada kegiatan penyediaan kamar mandi umum MCK di Kelurahan Duri Barat berdasarkan sarana dan prasarana lengkap dengan septictank komunal yang disediakan di RT004/RW005 yang sudah memiliki prasarananya untuk mengalirkan air ke drainase yang cukup baik terjadi secara alami ataupun buatan manusia dengan standar teknis yang harus memiliki sistem yang memadai yaitu kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septictank individual/domestik, komunal maupun terpusat, yaitu hanya di RT004/RW005 sudah memiliki kloset rumah yang terhubung dengan septitank individu sesuai dengan persyaratan teknis ada beberapa RT/RW yang masi belum memiliki pengelolaan septictank yang berbasis setempat atau pusat.

### 3. Ketersediaan Jalan dan Drainase

Salah satu penyebab kerusakan jalan adalah melesatnya laju pertumbuhan suatu kawasan. Bertambah padatnya jumlah penduduk suatu kawasan membuat lalu lintas semakin padat sehingga dapat mempercepat kerusakan jalan. Selain itu buruknya saliuran drainase juga turut mempengaruhi kerusakan jalan tersebut.

Saluran drainase merupakan salah satu bangunan pelengkap pada ruas jalan yang sangat berfungsi untuk mengalirkan air yang dapat mengganggu penggunaan jalan, agar badan jalan tetap kering. Saluran drainase merupakan salah satu persyaratan teknis prasarana jalan.

**Tabel I.3 Ketersediaan Jalan dan Drainase**

Nama Lokasi	Unit	Kriteria
RT01/RW04	1	Ketersediaan Akses
RT05/RW02	1	Ketersediaan Akses
RT03/RW09	1	Tidak Terpenuhinya Akses
RT05/RW09	1	Ketersediaan Akses
Jumlah	4	

*Sumber : pedoman umum program (kotaku)*

Berdasarkan tabel diatas diketahui pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada kegiatan penyediaan jalan dan drainase di Kelurahan Duri Barat yang sudah berlangsung cukup baik dalam kawasannya.

Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ini adalah salah satu dari 10 lokasi sasaran Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Duri. Luas kawasan Kelurahan Duri Barat yaitu 88,04(Ha) dengan jumlah penduduk 15.293 jiwa. Sebagai wilayah pemekaran, kondisi sarana dan prasarana di Kelurahan Duri Barat masih sangat terbatas, termasuk sarana air bersih yang merupakan kebutuhan vital hidup manusia, bahkan bisa dikatakan jika hendak tidur dan bangun tidur yang pertama kali dicari adalah air bersih.

Keputusan untuk membangun sebuah program berdasarkan latar belakang tergantung kondisi tempatan dan tergantung kebutuhan masyarakat. Kelurahan Duri Barat ini yaitu kelurahan yang jauh dari sumber air bersih, air yang sedikit sulit di dapatkan , sumber PDAM sedikit terbatas dan daerahnya yang agak kering

dan gersang sehingga sulit untuk mendapatkan air bersih. Awalnya untuk mendapatkan air bersih warga Kelurahan Duri Barat hanya memanfaatkan dua sumur gali yang terdapat di area pemukiman warga bahkan ada beberapa warga yang membeli air untuk kebutuhan sehari-hari bahkan ada juga sebagian warga mengambil air itu untuk air minum padahal kualitas air disana kurang bagus untuk di konsumsi. Sayangnya pada musim-musim tertentu seperti kemarau sumur tersebut tidak berfungsi maksimal, karena kedalaman sumur hanya 10-15 meter. Ditambah topografi wilayah kelurahan duri barat ini berbukit-bukit akibatnya ketersediaan air bersih sangat terbatas malah pernah mengalami kekeringan.

Sebelum pengadaan sumur bor (air bersih) dibangun, masyarakat termasuk anak-anak usia sekolah harus antri hingga berjam-jam untuk memperoleh air bersih di dua sumur gali yang tersedia. Bahkan kadang warga harus menunggu sampai malam sehingga menyita waktu belajar bagi anak-anak sekolah di sore atau malam hari serta juga mengganggu waktu ibadah masyarakat. Atas usulan masyarakat pembangunan fasilitas sumur bor menjadi prioritas dalam program penanggulangan kemiskinan karena dinilai perlu mendesak untuk diadakan.

Masyarakat begitu yakin dengan adanya sumur bor kebutuhan air bersih di wilayah tersebut dapat terlayani serta memberikan dampak positif bagi anak-anak usia sekolah, khususnya masyarakat miskin. Setelah ada sumur bor air bersih yang di bangun warga Kelurahan Duri Barat tidak lagi mencemaskan musim kemarau karen sarana air bersih ini dirasakan sangat besar manfaatnya waktu belajar anak-anak menjadi terbuka, waktu ibadah masyarakat tidak terganggu lagi dan musim kemarau tidak lagi kesulitan air bersih. Selain itu, air bersih dapat

dengan mudah dan cepat di jangkau oleh masyarakat. Bahkan, beberapa masyarakat telah memanfaatkan air bersih untuk membuka usaha baru seperti pencucian motor dan mobil.

Fasilitas pembuatan mck umum tidak seharusnya di bangun di kelurahan Duri barat tersebut karena tidak sesuai dengan yang apa di butuhkan masyarakat di Kelurahan Duri Barat itu berdasarkan fakta di lapangan masyarakat telah memiliki fasilitas mck kamar mandi yang berada di rumah masing-masing. Seharusnya mck umum di bangun di tempat pemukiman yang kumuh, penduduknya yang miskin, fasilitas mck umum yang sulit di dapatkan dan kondisi rumah yang berpondok-pondok maka akan relevan pembuatan mck umum tersebut di wilayah itu. Sedangkan di Kelurahan Duri Barat sendiri seperti masih banyak terdapat jalan yang rusak dan berlobang juga gang yang sempit sehingga jalan tersebut tidak bisa di lewati oleh kendaraan beroda empat dan hanya bisa dilewati kendaraan beroda dua dan dreinase yang tidak memadai juga sering mampet serta kurangnya dalam memperluas lahan untuk kepentingan bersama masyarakat Kelurahan Duri Barat tersebut.

Namun atas program yang dimulai pada saat pengerjaanya waktu itu tidak ada keterbukaan informasi dalam progam tersebut tidak adanya plang jadi tidak dapat membedakan itu sebuah proyek atau program pada saat masing-masing pembuatan parit dan semenisasi di gang laura dan omega rw 2 rt 5. Masyarakat sekitar juga punya hak untuk mengetahui dan mengawasi proyek atau program yang ada di lingkungannya. Tetapi kalau plang tidak ada masyarakat tidak tau apa yang mau diawasi masyarakat karena dasar proyek masyarakat tidak dapat

mengetahuinya. Masyarakat pengguna wajib mengetahui spesifikasi program , berapa dana, berapa volume dan lainnya. Semua informasi tentang program ini sewajarnya di buka dan di tempel biar semua masyarakat bisa mengetahui program tersebut.

Setelah dibangun ternyata mck umum itu tidak begitu banyak di manfaatkan oleh masyarakat hanya di gunakan oleh sebagian masyarakat yang terbatas yang betul-betul ada di lingkungan sekitar itu saja. Seharusnya yang dibangun yaitu jalan lingkungan yang di perbaiki agar semua orang bisa melewatinya dan semestinya di prioritaskan sebab sebagai salah satu yang dibutuhkan masyarakat setempat. Tujuan program ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program KOTAKU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penanganan permukiman kumuh yang dimaksud dalam Program KOTAKU tidak hanya mengatasi kekumuhan yang sudah ada, namun juga untuk mencegah tumbuhnya kekumuhan baru dan juga meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di pemukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan pemukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Dalam tujuan tersebut bermaksud memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di pemukiman kumuh perkotaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh, berbasis masyarakat, dan partisipasi pemerintah daerah.



Namun pada kenyataan yang ada dilapangan program kota tanpa kumuh (kotaku) di Kelurahan Duri Barat kecamatan Mandau masih terdapat beberapa fenomena seperti:

1. Resapan air dan pengolahan limbah pemukiman kurang optimal sehingga manfaat dari pemukiman tidak maksimal
2. Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk dan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan dan pemukiman
3. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan atau banjir

Setelah program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Duri Barat ini berjalan banyak memberikan dampak yang baik bagi masyarakat Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) telah memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama penyediaan air bersih yang sangat baik. Di samping itu, masyarakat mengapresiasi bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, dan pengelolaan persampahan yang cukup baik. Karena pembangunan tersebut juga perlu sekali dipertimbangkan juga dampak-dampak yang tidak dimungkinkan. Salah satu dampaknya adalah jalan rusak. Sekitar pembangunan itu jalannya dikeruk. Mungkin membangun melewati area pemajekan masyarakat. Serta Meminimalisir dampak negatif memaksimalkan dampak positif, selain itu Dampak dalam pembangunan pada aspek ekonomi secara umum dapat dilihat dari indikator penyerapan tenaga kerja, berkembangnya struktur ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat dan perubahan lapangan pekerjaan. Salah satu variabel ekonomi untuk melihat kesejahteraan akibat pembangunan ekonomi dan sosial

masyarakat adalah tingkat pendapatan. Melihat dalam indikator kualitas hidup upaya permukiman kumuh, program penanganan kumuh harusnya akan meningkatkan ekonomi masyarakat yang ditunjukkan dari adanya lapangan kerja baru yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sebagai bentuk pembangunan, setiap pembangunan ekonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun demikian, beberapa hal belum sesuai yang diharapkan seperti aparatur yang kurang disiplin, responsibilitas yang rendah, fasilitas pengamanan dan kebakaran yang belum memadai, dan penyediaan septictank komunal yang masih kurang,

Sebuah keberhasilan dari program-program tersebut dikarenakan dengan beberapa hal yang mampu seperti responsivitas dari pemerintah yang tinggi, sumber data yang mendukung, kesadaran dari masyarakat, dan kepemimpinan yang baik. Sedangkan penyebab dari kurang tercapainya keberhasilan program-program tersebut seperti kurang efektifnya komunikasi dan koordinasi dari para pelaku-pelaku yang terlibat baik dari pemerintahan maupun masyarakatnya, dengan berbagai hambatan-hambatan seperti standar program yang kurang terlaksana, komunikasi, sikap pelaksana, dan kondisi sosial yang ada di lingkungan masyarakat.

Harapan dari program kota tanpa kumuh (kotaku) di Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ini yaitu dapat meningkatnya kemandirian masyarakat dalam perbaikan lingkungan permukiman kumuh, terbangunnya perilaku bermukim yang bersih, sehat dan produktif bagi warga masyarakat serta terbangunnya sistem layanan pengadaan hunian yang layak dari

terjangkau bagi warga masyarakat tidak mampu didaerah yang didukung oleh lembaga keuangan yang kuat dan stabil. Maka ada suatu kontradiksi antara kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas yang di butuhkan dengan fasilitas yang di bangun itulah sebabnya sebagian pelaksanaan program kota tanpa kumuh (kotaku) di Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis itu perlu di Evaluasi.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) DiKelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau?”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimana Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (kotaku) di Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (kotaku) di Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan diatas dapat ditetapkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (kotaku) di Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau

2. Untuk mengetahui dimensi positif dan negatif Program Kota Tanpa Kumuh (kotaku) di Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini bagi peneliti adalah :

- 1) Kegunaan Teoritis, yakni diharapkan hasil ini mampu menjawab keingintahuan penulis tentang Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (kotaku) di Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau. Kegunaan praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca tentang Evaluasi Dampak Program (kotaku) Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau
- 2) Kegunaan akademik, yaitu hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan masukan atau bahan informasi bagi kalangan akademia lainnya untuk melakukan penelitian sejenis
- 3) Sebagai sumber informasi untuk penelitian lebih lanjut oleh peneliti lain

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Sebagai acuan untuk menjawab tujuan penelitian ini, penulis mengembangkan beberapa studi kepustakaan yang relevan dengan masalah penelitian. Berikut ini penulis mengemukakan konsep-konsep yang mendukung berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan yang terjadi. Maka dari itu berikut akan dijelaskan beberapa teori yang ada hubungannya dengan masalah pokok untuk mencari jalan keluarnya.

##### 1. Konsep Administrasi Publik

Kata administrasi berasal dari bahasa latin “administrate” yang berarti to manage Derivasinya antara lain menjadi “administratio” yang berarti bestruing atau pemerintahan. Adminsitrasi dapat artikan menjadi empat. Pertama , usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan seras penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Kedua, usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan kebijaksanaan serta mencapai tujuan. Ketiga, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah. Keempat, kegiatan kantir dan tata usaha (Ridwan HR. 2014).

Menurut The Liang Gie (dalam Zulkifli,2005;23) Administrasi adalah segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu. Pekerjaan yang dimaksudkan mencakup unsur-unsur umum administrasi dalam perspektif proses.

Sedangkan menurut Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Presthus (dalam Pasolong 2010;7) mendefenisikan administrasi publik, adalah :

- Meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik
- Koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah
- Suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan maksud terhadap usaha sejumlah orang

Administrasi merupakan upaya sadar kerjasama antar manusia yang memiliki derajat rasionalitas yang tinggi dan akhirnya akan sampai pada sebuah titik yang dinamakan tujuan (dalam Wicaksono 2014;9)

Menurut Leonard D. White administrasi adalah suatu proses yang umum pola setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil (dalam Safiie 2003:13)

Menurut Hadari Nawawi administrasi adalah kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam syafiie, 2003:5)

Wododo Wilson (dalam Miftah Thoha,2008;9) bahwa administrasi merupakan suatu bidang usaha (a field of bussines) dan harus dipisahkan dari politik.

Administrasi menurut Irawan (2017;25-27) dibagi menjadi dua pengertian, yaitu:

1. Administrasi dalam arti sempit yaitu dimaknai sebagai kegiatan “*tulis-menulis*,”*catat-mencatat*,”*mengetik*,”*surat-menyurat(correspondence)*”, yaitu suatu proses kegiatan yang

berkaitan dengan pengiriman informasi secara tertulis dimulai dari penyusunan, penulisan hingga pengiriman informasi dan sampai kepada pihak yang telah dituju.

2. Administrasi dalam arti luas adalah sebagai proses kerja sama saat penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Zulkifli (2005;20) terdapat tiga pengertian substansial yang terkandung dalam sejumlah konsep administrasi yaitu:

1. Bahwa administrasi dapat dipandang sebagai seni. Keberhasilan penerapannya memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat situasional dan kondisional. Administrasi sangat terikat kepada aspek kondisi, situasi waktu dan tempat dimana dia dijalankan
2. Bahwa dalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur; adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan; adanya perlengkapan dan peralatan untuk melaksanakan tugas; dan adanya pertimbangan rasionalitas dalam merumuskan dan menyediakan setiap unsur tersebut diatas.
3. Bahwa administrasi sebagai suatu proses kerjasama bukan merupakan konsep yang baru. Dia sudah ada dan dijalankan sejak manusia sudah mengenal peradaban. Tentang keberadaan administrasi sebagai suatu proses tindakan

Dari beberapa definisi administrasi publik diatas dapat dipahami bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien.

## 2. Konsep Organisasi Publik

Organisasi menurut Siagian (dalam Tarmizi dan Hendry Andry 2015;14) adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan nama terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan .

Organisasi merupakan unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai aktifitas (proses) bagi pencapaian tujuan (wirman,2012;12)

Menurut Dwight Waldo organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antara orang-orang pada sistem administrasi(dalam syafiie,1999:53).

Sedangkan menurut Robbins (1994;49) organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan.

Menurut Zulkifli (2005;131) yang mengatakan bahwa sebuah organisasi sebagai sistem apapun bentuk dan juga jenisnya adalah bersifat dinamis dan juga



terbuka. Terbuka karena tidak mungkin menghindari dari berbagai bentuk pengaruh perubahan yang datang dari aspek lingkungan, terutama lingkungan eksternal.

Menurut Chester L. Barnard organisasi adalah sebagai sebuah system tentang aktifitas kerjasama dua orang atau lebih dari sesuatu yang tidak berwujud dan tidak pandang bulu yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi(syafiie,1999;53)

Menurut Tarmizi dan Hendry (2015;14) dari batasan makna organisasi dapat ditinjau dari dua aspek yaitu organisasi sebagai wadah dimana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan, organisasi sebagai rangkaian hierarki antara orang-orang dalam suatu ikatan formal.

Dari berbagai pengertian organisasi menurut para ahli diatas, dapat dipahami bahwa organisasi adalah suatu wadah atau tempat untuk terlaksanakannya serangkaian proses kerjasama dari orang-orang yang berbeda dalamnya, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama.

### **3. Konsep Manajemen Publik**

Menurut Sondang P.Siagian (2003;05) manajemen yaitu proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena manajemen merupakan alat pelaksanaan administrasi.

Fungsi-fungsi manajemen menurut Allison (dalam Sukidin;244) adalah:

- Menetapkan sasaran-sasaran dan prioritas bagi organisasi berdasarkan ramalan-ramalan mengenai lingkungan eksternal dan kapasitas-kaositas organisasi.
- Memikirkan rencana-rencana operasional untuk mencapai sarana-sarana ini

Tery (dalam Hasibuan 2002;02) mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk melakukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya lainnya.

Manajemen adalah disiplin ilmu yang multi segi manajemen harus berurusan dengan sumber-sumber heterogen. Kinerjanya tergantung dari tersedianya pengetahuan dan keterampilan berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, psikologi, dan sebagainya. Karena hal tersebut kadang-kadang manajemen tersebut ilmu perilaku (Wirjana,2007;13)

Martoyo (2000;25) yang mengatakan bahwa aktifitas manajemen sumber daya manusia adalah segala tindakan ataupun langkah yang dilakukan untuk menyediakan dan mempertahankan suatu jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tepat bagi organisasi agar tujuan manajemen tercapai.

Dari defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan suatu tempat dimana administrasi dijalankan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Administrasi merupakan suatu proses yang melaksanakan setiap bentuk kegiatan atau aktifitas organisasi.

#### 4. Konsep Evaluasi Dampak

Menurut Zulkifli (2009:137) Evaluasi (Penilaian) merupakan suatu proses analisis data yang diperoleh melalui proses pengawasan untuk menentukan hasil factual dari pelaksanaan pengawasan itu.

Menurut Nurcholis (2007:277) Evaluasi merupakan suatu proses yang berdasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Menurut winarno (2012:228) bila kebijakan dipandang suatu pula kegiatan yang berurutan maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi merupakan bykan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tujuan tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan, sering kali terjadi kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan demikian evaluasi kebijakann ditujukan untuk melihat seba-sebab kegagalan suatu kebijakan atau mengetahui apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan dalam bahasa yang disingkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan.

Evaluasi kebijakan merupakan usaha untuk menentukan dampak dari kebijakan pada kondisi-kondisi kehidupan nyata. Kalimat “usaha untuk

menentukan” digunakan dalam pembahasan ini karena evaluasi dipahami sebagai usaha untuk menentukan dampak atau konsekuensi yang sebenarnya dari kebijakan, suatu tugas yang sebenarnya sangat kompleks dan sulit (Anderson dalam Winarno 2007:231). Secara minimum, tujuan evaluasi kebijakan adalah mengetahui apa yang ingin dicapai dari suatu kebijakan tertentu (tujuan-tujuan tertentu), bagaimana melakukannya (program-program), dan jika ada, apakah telah mencapai tujuan-tujuan (dampak atau akibat dan hubungan kebijakan) yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Poister (dalam Mutrofin, 2005:80), berdasarkan asumsi bahwa kriteria untuk riset terapan seperti riset kebijakan juga berlaku untuk riset evaluasi, maka sekurang – kurangnya terdapat enam kriteria utama yang dapat digunakan sebagai acuan untuk riset evaluasi. Kriteria – kriteria yang dimaksud antara lain sebagai berikut.

1. Effectiveness (efektifitas, keefektifan). Kriteria ini berkaitan dengan apakah suatu program ataupun proyek mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan oleh program atau proyek. Pada umumnya efektivitas diukur berdasarkan unit produk, jasa layanan program atau nilai moneter karena secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis.
2. Efficiency (efisiensi). Kriteria ini digunakan untuk menjawab pertanyaan seberapa banyak suatu usaha diperlukan guna mencapai hasil atau tujuan program dan proyek yang diharapkan. Jadi efisiensi berhubungan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan efektifitas tertentu. Efisiensi merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi yang juga seringkali ditentukan atau diukur dari ongkos moneter dan ditentukan melalui perhitungan biaya perunit produk atau layanan. Suatu program atau proyek dikatakan efisien apabila mencapai efektivitas sangat tinggi namun dengan menggunakan dana atau biaya yang paling rendah.
3. Adequacy (kecukupan). Kriteria ini berhubungan dengan pertanyaan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan para pihak yang terlibat dalam program atau proyek dalam memecahkan suatu masalah. Kriteria kecukupan lebih menekankan pada pola hubungan antara alternatif desain program atau proyek dengan hasil tujuan yang diinginkan.

4. Equity (kesamaan atau perataan). Criteria kesamaan atau perataan merujuk pada kemampuan program atau proyek dalam menjangkau berbagai kelompok masyarakat yang berbeda – beda. Jadi criteria ini berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat atau hasil dan usaha secara adil.
5. Responsiveness (responsivitas). Kriteria ini digunakan untuk menjawab pertanyaan seberapa jauh hasil suatu program atau proyek dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok – kelompok masyarakat tertentu. Empat kriteria terdahulu biasanya belum dipandang memuaskan apabila belum juga menyertakan kriteria responsivitas. Apakah PKPS-BBM benar – benar menjangkau kelompok miskin atau dinikmati sejumlah kelompok keluarga berkecukupan merupakan objek kriteria responsivitas. Termasuk misalnya apakah skema program kredit tanpa agunan benar – benar menjangkau atau dinikmati oleh unit usaha kecil, menengah dan mikro ataukah hanya dinikmati oleh kelompok usaha besar.
6. Appropriateness (ketepatan atau kelayakan). Criteria ini erat sekali hubungannya dengan rasionalitas substantif sebab pertanyaan tentang ketepatan atau kelayakan suatu program atau proyek tidak berkenaan dengan satuan criteria individu melainkan dua atau lebih criteria secara bersama- sama. Ketepatan atau kelayakan program dan proyek menunjuk pada nilai atau harga dari tujuan program atau proyek dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan – tujuan tersebut sebagaimana terpapar dalam matriks program / proyek (logika kerangka kerja program) Criteria ketepatan atau kelayakan tidak dapat didefinisikan secara baku karena dimaksudkan untuk mnjangkau keluar criteria yang sudah ada. cara terbaik untuk menentukan criteria ini ialah dengan menggabung – gabungkan sejumlah criteria lain, misalnya criteria keadilan dan efisiensi, efisiensi, efektivitas, dan keadilan, dsb.

Adapun menurut Taliziduhu Ndraha dalam buku konsep administrasi dan administrasi di Indonesia berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya (Ndraha,1989:201)

Menurut Langbein dalam Wibawa (1994:38), dimensi dampak disoroti oleh:

1. Waktu. Dimensi ini merupakan dimensi yang penting terkait dengan kebijakan yang memberikan dampak sekarang dan yang akan datang.
2. Selisih antara dampak aktual dengan yang diharapkan Evaluator perlu memperhatikan dampak-dampak yang tidak diinginkan dan bertentangan dengan yang diharapkan

3. Tingkat agregasi dampak yang dirasakan secara individu akan dapat mempengaruhi pada perubahan di masyarakat secara keseluruhan
4. Tipe dampak pada kehidupan ekonomi, proses pembuatan kebijakan, sikap publik, dan pada kualitas kehidupan individu, kelompok dan masyarakat yang bersifat non ekonomis

Menurut Anderson (dalam Irfan Islamy 1984:115) bahwa dampak kebijaksanaan tersebut mempunyai beberapa dimensi yaitu:

- Dampak kebijaksanaan yang diharapkan (intended consequences) maupun tidak diharapkan (unintended consequences)

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Evaluasi dampak yaitu yang dapat dirasakan secara individual dan akan dapat mempengaruhi masyarakat dalam perubahan yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung.

#### 5. Kawasan Pemukiman Kumuh

Didalam UU No 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan tinggi, kualitas bangunan serta sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Menurut SDGs (Sustainable Development Goals 2015) rumah tangga dalam permukiman kumuh adalah kelompok individu yang tinggal dibawah satu atap di daerah perkotaan yang tidak mempunyai salah satu dari indikator berikut:

- a. Rumah yang kokoh yang dapat melindungi penghuninya dari kondisi cuaca yang ekstrim
- b. Rumah huni yang cukup, yang berarti tidak lebih dari 3 orang menghuni 1 ruang bersama
- c. Akses yang mudah ke air bersih (aman) dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau

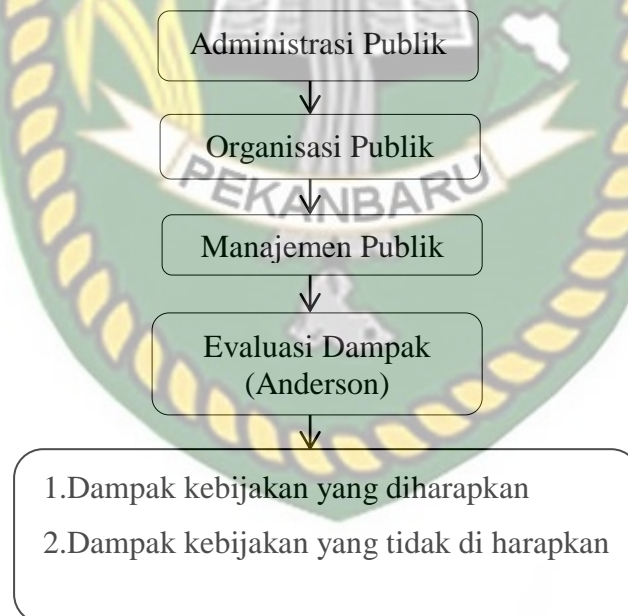
- d. Kepastian atau rasa aman bermukim, yang dapat melindungi penghuninya dari pergusuran paksa

Sebab munculnya permukiman kumuh, dikarenakan meningkatnya jumlah penduduk kota yang berlebihan terutama akibat migrasi, mereka masuk dengan keahlian dan keterampilan yang terbatas, membawa konsekuensi perluasan permukiman kumuh.

## B. Kerangka Pikir

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan, maka penulis membuat suatu kerangka pikir dan penelitian ini, sebagai berikut:

**Gambar II.1. Kerangka Pikir Tentang Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) DiKelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis**



*Sumber : Olahan Penulis, 2021*

## C. Konsep Operasional

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut :

- a. Menurut Tracker, administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan secara bersama orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama (dalam keban,2014:2)
- b. Menurut Scott dan Mitchell, organisasi adalah sebuah sistem bagi aktifitas-aktifitas terkoordinasi sekelompok orang yang bekerja bersama-sama menuju satu tujuan umum di bawah otoritas dan kepemimpinan pihak tertentu yang disepakati (dalam Nigro dan Liyod G. Nigro, 2012;133)
- c. Manajemen sendiri lebih dikenal dalam industri sebagai fungsi pengekseskusi kebijakan dari korporat, yang memiliki batas melalui administrasi dan pegawai organisasi untuk objek-objek yang berbeda dari administrasi (dalam Sugandi,2015:3)
- d. Menurut Kraft dan Furlong kebijakan publik dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi, nilai politik yang berlaku dan suasana hati masyarakat pada suatu waktu, struktur pemerintahan, dan norma nasional serta norma budaya lokal, merupakan variabel yang lain (dalam Nugroho, 2014;105)
- e. Didalam UU No 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan tinggi, kualitas bangunan serta sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.



- f. Program Kotaku merupakan salah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak
- g. Peningkatan kualitas kumuh adalah peningkatan kualitas lingkungan yang semula kumuh menjadi sehat. Untuk meningkatkan kawasan permukiman, maka perlu melakukan pemugaran dilakukan dengan perombakan dan penata rumah, sarana, prasarana, dan utilitas umum agar tercipta keamanan penghuni dan masyarakat sekitar, permukiman kembali dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya.

#### D. Operasional Variabel

Adapun operasional variabel dalam penelitian ini adalah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.1 Operasional Variabel Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) diKelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis**

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
Evaluasi adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson, dalam Irfan Islamy 1984:115)	Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (kotaku)	Dampak kebijakan yang diharapkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan</li> <li>2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat</li> <li>3. Meningkatkan nilai sosial masyarakat</li> <li>4. Meningkatkan nilai ekonomi masyarakat</li> </ol>
		Dampak kebijakan yang tidak diharapkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya sumber-sumber yang terbatas seperti tenaga, biaya, meterial, waktu dan sebagainya.</li> <li>2. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pembangunan dalam menjaga fasilitas infrastruktur yang dibangun.</li> </ol>

Sumber: Data Olahan Penulis, 2021

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Adapun jenis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang hanya memaparkan suatu gejala, tidak dimaksud untuk mengkaji hipotesis tetapi lebih menggambarkan apa adanya suatu variabel. Peneliti bermaksud memberikan hasil analisa informasi yang detail terhadap objek penelitian.

Menurut Lodico, Spaulding, dan Voegle (2010:2) penelitian kualitatif adalah suatu metodologi yang di pinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan diadaptasi dalam seting pendidikan. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan dibawah studi. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari seting sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah (legitimate)

#### B. Lokasi Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Adapun pertimbangan penulis sebagai objek penelitian yaitu berdasarkan fenomena yang ada di Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau ini dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) masih belum terlayani , sehingga tujuan dari program kotakumuh belumlah maksimal dengan baik. Jika dilihat dari fenomena yang terjadi dilapangan, masih banyak kawasan kumuh yang perlu segera ditangani di

kawasan kumuh Kelurahan Duri Barat. Oleh karena itu semua yang terlibat dalam pelaksanaan program kotaku ini harus bekerjasama dengan baik, agar tercapai tujuan yang ingin dicapai.

### **C. Informan dan Key Informan Penelitian**

Untuk mendapatkan informasi mengenai evaluasi dampak program kota tanpa kumuh (kotaku) di Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, penentuan informasi kunci dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara teknik purposive sampling, adalah suatu teknik penarikan sampel yang digunakan dengan disengaja menunjuk langsung seseorang yang dianggap penting dan dapat mewakili karakteristik populasi, sedangkan informan utama dalam penelitian ini adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Teknik penentuan informan utama dalam melakukan penelitian ini adalah dengan accidental sampling, yaitu penetapannya secara spontan tanpa pertimbangan tertentu. Penelitian ini mengambil siapa saja yang menurut pertimbangan sesuai dengan yang dimaksud dalam tujuan penelitian.

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau masalah tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan dapat dipercaya. Menurut Hendarsono dalam Suyatno (2005:171-172), informan penelitian meliputi tiga macam yaitu:

- 1) Informan kunci (key informan) yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
- 2) Informan umum, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

- 3) Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

**Tabel III.1 Key Informan**

No	Key Informan	Jumlah
1	Lurah	1
2	Koordinator BKM	1
3	Askot mandiri	1
4	Tokoh masyarakat	7
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>

*Sumber : Olahan Penelitian, 2021*

#### **D. Teknik Penetapan Informan**

Teknik penetapan informan menggunakan purposive sampling yaitu mengambil berdasarkan karakteristik atau kriteria tertentu (Sugiyono,2014:85). Kriteria yang dimaksud dalam penelitian ini adalah informan yang benar-benar terlibat dalam mengetahui Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (kotaku) (studi pada Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah :

- 1) Data primer

Yaitu data dan informasi yang peroleh dan dikumpulkan lalu diolah sendiri oleh penulis yang didapat dari objek penelitian

- 2) Data sekunder

Yaitu data yang memperkuat penelitian dan tersedia di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang dipublikasikan yang mana dapat mendukung dan menjelaskan masalah.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

1) Observasi

Yaitu pengamatan yang dilakukan langsung ketempat penelitian terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku

2) Wawancara

Yaitu salah satu teknik yang dapat ditempuh seorang peneliti untuk mengumpulkan data dari responden dengan melakukan tanya jawab secara langsung. Teknik ini dilakukan agar informasi yang didapatkan lebih jelas dan akurat.

3) Dokumentasi

Alat pengumpulan datanya disebut form pencatatan dokumen dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen tersedia juga termasuk dokumen ekspresif, seperti biografi, autobiografi, surat-surat, dan buku harian. Dan termasuk juga laporan media masa baik melalui surat kabar, majalah, radio, televisi, maupun media cetak dan elektronik lainnya.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menggunakan data deskriptif yaitu membandingkan data yang ada dan teori yang mendukung dan bersifat menjelaskan dan menguraikan.

Menurut Miles dan Hubrman (2010:129) ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

**Gambar III.1: Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif**



1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstrak dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.

2. Model Data (data display)

Mendefenisikan model sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun dan membolehkan pendekskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan / Verifikasi Kesimpulan

Dari pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah “makna”sesuatu, mencatat keteratutran, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin alur kausal dan proposisi.

## H. Jadwal dan Waktu Kegiatan penelitian

Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (kotaku) DiKelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

**Tabel III.2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) DiKelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis**

No	Jadwal kegiatan	Bulan minggu ke																							
		Oct				Nov				Des				Jan				Feb				Mar			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Up																								
2	Seminar Up																								
3	Revisi Up																								
4	Revisi Wawancara																								
5	Rekomendasi Survey																								
6	Survey Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian konfrehensif																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Pengaduan Skripsi																								

Sumber: Modifikasi Penulis, 2022



## I. Rencana Sistematis Laporan Penelitian

Adapun sistematis penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini dibahas dalam 6 BAB, diaman pembahasan-pembahasan BAB mempunyai kaitan antara satu dengan lainnya yaitu sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada BAB ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian

### **BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR**

Pada BAB ini merupakan landasan teori untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya akan diuraikan kerangka pikir, hipotesis, konsep operasional, operasional variabel, dan teknik pengumpulan data.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, key informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan penelitian serta sistematika penulisan laporan penelitian.

### **BAB IV: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

Pada BAB ini membahas mengenai deskripsi atau penggambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada BAB ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan.

Hasil dari penelitian terdiri dari identitas responden, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dll. Pada hasil pembahasan akan dibahas tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang

Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (kotaku)

DiKelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

**BAB VI : PENUTUP**

Pada BAB terakhir ini merupakan BAB penutup, peneliti membaginya kedalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran.



## BAB IV DEKSRIPSI LOKASI PENELITIAN

### A. Sejarah Singkat

#### 1. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956), Kabupaten Bengkalis dengan Ibu Kotanya Bengkalis dipimpin oleh seorang Bupati Kepala Daerah Tingkat II. Kabupaten Bengkalis ini, yaitu merupakan wilayah Kabupaten yang terluas nomor satu di Provinsi Riau.

Provinsi Riau sendiripun termasuk salah satu Provinsi yang paling kaya di Indonesia. Kekayaannya meliputi hasil pertambangan, minyak bumi, batu bara, hutan, kelapa sawit, karet, hasil-hasil perkebunan seperti kelapa sawit, karet, hasil-hasil laut serta sungai dan lainnya. Sedangkan sumbangan Provinsi Riau ke pusat setiap tahunnya hampir mencapai jumlah 59,6 triliun .

Bengkalis pada masa lalu memegang peranan penting dalam sejarah. Dimulai pada tahun 1645, Bengkalis hanya merupakan kampung nelayan. Berdasarkan sumber sejarah, pada tahun 1678, daerah Bengkalis ini menjadi tempat pertemuan pedagang Melayu, Jawa, Arab yang membawa barang dagangannya bersama dengan pedagang-pedagang dari Palembang, Jambi, Indragiri, Aceh, Kedah, Perak, Kelong, Johor, Penang, Petani, Siam, Kamboja, Kocin, Cina dan orang-orang Minangkabau yang mendiami Sumatra dan datang

kesana untuk mengambil garam, beras dan juga ikan (terubuk) yang banyak di tangkap oleh orang-orang Selat.

Kabupaten Bengkalis meliputi bagian pesisir Timur Pulau Sumatera antara  $2^{\circ}30'$  Lintang Utara (LU),  $-0^{\circ}17'$  Lintang Utara atau  $100^{\circ}52'$  Bujur Timur (BT),  $-102^{\circ}52'$  Bujur Timur (BT),  $-102^{\circ}$  Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bengkalis yaitu  $30.646.83 \text{ km}^2$ , meliputi pulau-pulau (daratan) dan lautan. Kabupaten Bengkalis pusat pemerintahannya dan menjadi ibu kotanya adalah Kota Bengkalis dan terletak di Pulau Bengkalis. Wilayah administrasinya sebagian meliputi wilayah di Pulau Sumatera seperti Duri, Dumai. Jarak antara Duri – Bengkalis 106 kilometer, Dumai- Bengkalis 78 kilometer, kedua wilayah tersebut berada di Pulau Sumatera yang dipisahkan oleh laut. Sarana transportasi dari Pulau Sumatera ke daerah ini dapat menggunakan kapal penumpang (ferry) dari Dumai, Pakning, dan Pekanbaru. Selain itu masih terdapat kapal Roro yaitu kapal yang dapat mengangkut barang dan kendaraan roda empat. Artinya, bahwa untuk menuju ke Bengkalis sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Bengkalis tidak ada kesulitan, hanya saja jadwalnya masih terbatas karena kapal penumpang maupun barang hanya satu sampai dua kali saja sehari. Dengan demikian para penumpang menunggu kapal sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Kabupaten Bengkalis ini wilayah administrasinya sebagian besar berada di Pulau Sumatera, namun ibukotanya berada di Pulau Bengkalis. Sehubungan dengan itu, Kota Bengkalis senantiasa di kunjungi orang-orang dari Pulau Sumatera untuk urusan pemerintahan (surat-surat izin dan lain sebagainya). Kota Bengkalis sendiri juga dikenal dengan sebutan Kota Terubuk. Terubuk merupakan

jenis ikan yang sangat terkenal terutama pada masa Datuk Laksamana, sedangkan pada saat ini semakin sulit ditemukan. Harganya yang mahal membuat para pemburu ikan berlomba-lomba mencarinya sehingga sangat mengancam perkembangan ikan ini.

Kota Bengkalis sebagai ibukota Kabupaten Bengkalis merupakan daerah yang baru saja berkembang. Namun secara historis Bengkalis pernah memegang peranan penting dalam sejarah. Sehubungan dengan itu, di Kota Bengkalis ini banyak ditemukan bangunan-bangunan bersejarah dan rumah-rumah tua walaupun banyak diantaranya sudah punah maupun tidak utuh lagi. Dalam perkembangannya Kota Bengkalis dihuni oleh berbagai suku bangsa terutama Melayu, Cina, Jawa, Minang, dan Batak disamping suku bangsa lainnya yang merupakan penduduk minoritas.

Masyarakat Melayu Bengkalis beragama Islam dan dalam kesehariannya identik dengan budaya Islam. Upacara-upacara tradisionalnya cenderung dengan tradisi Islam dan juga nilai-nilai kehidupan bernuansa Islami. Sehubungan dengan itu dalam falsafah Melayu disebutkan bahwa "Melayu adalah Islam, apabila tidak Islam berarti tidak Melayu".

Bengkalis merupakan daerah yang pernah memegang peranan penting dalam sejarah. Disana juga banyak terjadi berbagai peristiwa sejarah . Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa di Bengkalis banyak sekali terjadi peristiwa sejarah terlihat dari berbagai bangunan fisik yang ada, walaupun banyak yang sudah tidak utuh lagi. Dari peninggalan sejarah yang ada banyak nilai-nilai yang terkandung

di dalamnya. Hal ini bisa kita peroleh setelah kita mengetahui bagaimana proses terjadinya peninggalan sejarah tersebut.

Penduduk Kabupaten Bengkalis berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 551.683 jiwa yang terdiri dari atas 283.225 jiwa penduduk laki-laki dan 268.458 jiwa penduduk perempuan. Di bandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Kabupaten Bengkalis mengalami pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1,42 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 106,

Kepadatan penduduk di Kabupaten Bengkalis tahun 2016 mencapai 71 jiwa dengan rata-rata jumlah penduduk perumah tangga 4 orang kepadatan penduduk di delapan Kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk di Kecamatan Mandau dengan kepadatan sebesar 259 jiwa dan terendah di Kecamatan Rupert Utara sebesar 23 jiwa.

**Tabel IV.I Luas Kecamatan, Jumlah Penduduk dan Kota Kecamatan di Kabupaten Bengkalis**

No	Kecamatan	Kota Kecamatan	Luas Kecamatan
1	Bantan	Selatbaru	424,40 km
2	Bengkalis	Bengkalis	514,00 km
3	Bukit Batu	Sungai pakning	1.128,00 km
4	Mandau	Duri	937,47 km
5	Rupat	Batupanjang	1524,85 km
6	Rupat Utara	Tanjungmedang	628,50 km
7	Pinggir	Pinggir	2503,00 km
8	Siak kecil	Lubukmuda	742,21 km
9	Bathinsolapan	Sebangar	-
10	Bandar Laksamana	Tenggayun	-
11	Talang Muandau	Beringin	-

## 2. Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis

Visi merupakan cara pandangan jauh kedepan yaitu kemana sebuah instansi harus di bawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh sebuah instansi tersebut, sedangkan visi dalam sebuah pembangunan merupakan suatu kondisi yang di cita-citakan.

Visi pembangunan Kabupaten Bengkalis 2016-2021 yang merupakan kerangka pertama penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan telahan atas penjabatan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis yang telah ditetapkan adalah “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bengkalis yang Berkualitas”

Sedangkan misi pembangunan Kabupaten Bengkalis:

1. Meningkatkan kualitas Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Meningkatkan ketersediaan dan Kualitas Data Pembangunan Daerah

Adapun tujuannya :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas kelembagaan dan aparatur perencanaan
3. Menigkatnya jumlah dan kualitas data pembangunan daerah

## 3. Gambaran umum Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Kecamatan Mandau termasuk kecamatan yang asli (tertua) terbentuk bersamaan dengan Kabupaten Bengkalis berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1956 yaitu pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi

Sumatra Tengah dengan luas wilayah 937,47 km terdiri dari 15 desa/kelurahan, jumlah penduduk sebanyak 229,989 jiwa, adapun potensi daerah : pertambangan minyak bumi, perkebunan (karet dan sawit), peternakan (sapi, kambing, unggas), dan industry makro dan mikro, perdagangan, jasa pariwisata(sekolah gajah)

Keadaan Geografis Kecamatan Mandau yang ibukotanya Duri merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis yang berada di Pulau Sumatera, yang memiliki batas-batas wilayah :

1. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu & Kota Dumai
2. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Pinggir
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu
4. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu

Sedangkan letak wilayahnya adalah :

1. 0°56'12 Lintang Utara s/d 1°28'17" Lintang Utara
2. 100°56'10 Bujur Timur s/d 101°43'26" Bujur Timur

Kecamatan Mandau ini merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bengkalis yang paling besar ketiga berdasarkan luas wilayahnya, setelah Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Bukit Batu, yang mencapai 937,47 km<sup>2</sup>. Wilayah administrasi desa/kelurahan yang terbesar adalah Desa Bumbang yang mencapai luas 104 km<sup>2</sup> atau sebesar 11,09 persen dari luas total Kecamatan Mandau.

Kecamatan Mandau pertama kali berada di Muara Kelantan yang sekarang ini berada di wilayah Kabupaten Siak yaitu Kecamatan Sungai Mandau. Pada tahun 1960 ibu kota Kecamatan Mandau pindah ke Kota Duri dengan kantor pertamanya di pokok jengkol (lingkungan kantor Lurah Batang Serosa dan kantor



KUA sekarang) pada tahun 1977 kantor camat mandau pindah lokasi ke kantor yang sekarang berada di jalan Sudirman No. 56 Duri.

**Tabel IV.II Nama Kelurahan/Desa Di Kecamatan Mandau**

No	Kelurahan/Desa	Rw	Rt
1	Air Jamban	23	122
2	Babussalam	8	55
3	Balik Alam	10	35
4	Batang Sarosa	5	17
5	Duri Barat	12	59
6	Duri Timur	6	29
7	Gajah Sakti	11	51
8	Pematang Pudu	17	83
9	Talang Mandi	15	68
10	Bathin Betuah	4	18
11	Harapan Baru	5	20

*Sumber : UPT Disdukcapil 2017*

Kecamatan Mandau memiliki banyak sarana prasarana mulai dari sarana dan prasarana pendidikan sampai dengan sarana olahraga. Dalam bidang pendidikan kecamatan mandau memiliki 171 sekolah diantaranya Sekolah Dasar (SD) yang berjumlah 106 sekolah, SMP berjumlah 32 sekolah, SMA berjumlah 28 sekolah, dan juga memiliki 5 SLB. Kecamatan mandau ini memiliki 6 jumlah rumah sakit besar diantaranya adalah RSUD kec. Mandau, RS Mutia Sari, RS Permata Hati, RS PT Chevron Pasific Indonesia, RS Thursina, dan Rumah Sakit AAD. Dan juga memiliki jumlah mesjid yang sangat banyak yaitu 114 mesjid yang berada di seluruh daerah kecamatan mandau. Jumlah hotel yang ada di kecamatan mandau ada 9 hotel baik itu hotel berbintang maupun hotel biasa. Jumlah SPBU ada 2 yang berada di jalan hangtuah dan sudirman yang masih aktif sampai sekarang. Kecamatan mandau juga memiliki 13 jumlah Bank diantaranya yaitu Bank BRI, BNI, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Riau Kepri, BTN, 52

BCA, CIMB NIAGA, Mandiri, Mandiri Syariah, Mualamat, Bank Mega, dan Danamon. Sarana olahraga mulai dari lapangan bola, lapangan futsal, lapangan volly, dan bulu tangkis. Dan juga memiliki 12 gereja.

**Tabel IV.III Sarana dan Prasarana Kecamatan Mandau**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Sekolah Negeri/Swasta (SD,SMP, SMA, dan SLB)	171
2	Rumah Sakit	6
3	Mesjid	114
4	Hotel	9
5	SPBU	2
6	Bank	13
7	Sarana Olahraga	20
8	Gereja	12

*Sumber : UPT Disdukcapil 2017*

Adapun visi dan misi, tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yaitu:

Visi: Terwujudnya Pelayanan Yang Prima Kepada Masyarakat dan Meningkatkan Penerimaan Daerah Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan.

Misi: Meningkatkan profesionalitas aparatur pelaksana pelayanan PBB-P2, Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan PBB-P2, Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

Motto : Melayani dengan hati maklumat yaitu dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis yaitu membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan dibidang pendapatan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Badan Pendapatan daerah memiliki fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana pelaksanaan dan pemungutan dibidang pendapatan daerah.
2. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan retribusi daerah.
3. Pelaksanaan penetapan besarnya pajak dan retribusi daerah. 55
4. Pelaksanaan pendataan objek dan subjek PBB yang dilaksanakan direktirat PBB dalam menyampaikan dan menerima kembali SPOP wajib pajak.
5. Menyampaikan SPPT,SKP,SPT, dan sarana adminstrasi PBB lainnyayang diterbitkan oleh dirjen pajak kepada wajib pajak serta penyampaian DHPP PBB ynung dibuat oleh dirjen pajak kepada pemungut PBB yang ada dibawah pengawasan.
6. Mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah serta penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang baru.
7. Penyelenggaraan pembukuan dan pelaporann atas pemungutan dan penyeteran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
8. Koordinasi pengawasan dan pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan PBB yang dilimpahkan oleh menteri keuangan kepada daerah
9. Perencanaan dan pengendalian operasional dibidang pendapatan, penetapan, dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta PBB.
10. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan, dan perlengkapan.

#### **B. Gambaran Umum Kelurahan Duri Barat**

Pada awal terbentuknya Kelurahan Duri Barat ini adalah pada tahun 1979/1980 sebanyak 11 Kelurahan di Kecamatan Mandau dibentuk dengan sebutan desa muda yang dipecah dari kepenghuluan Air Jamban, dari 11 Kelurahan tersebut termasuklah Kelurahan Duri Barat yang kita kenal saat ini, kemudian pada tahun 1981, 11 Desa Muda tersebut dibentuklah Kelurahan yang salah satu Kelurahannya adalah Kelurahan Duri Barat. Dibentuknya Kelurahan Duri Barat ini adalah mengingat Kelurahan Duri Barat merupakan pusat Kota yang letaknya di bagian barat Jl. Sudirman

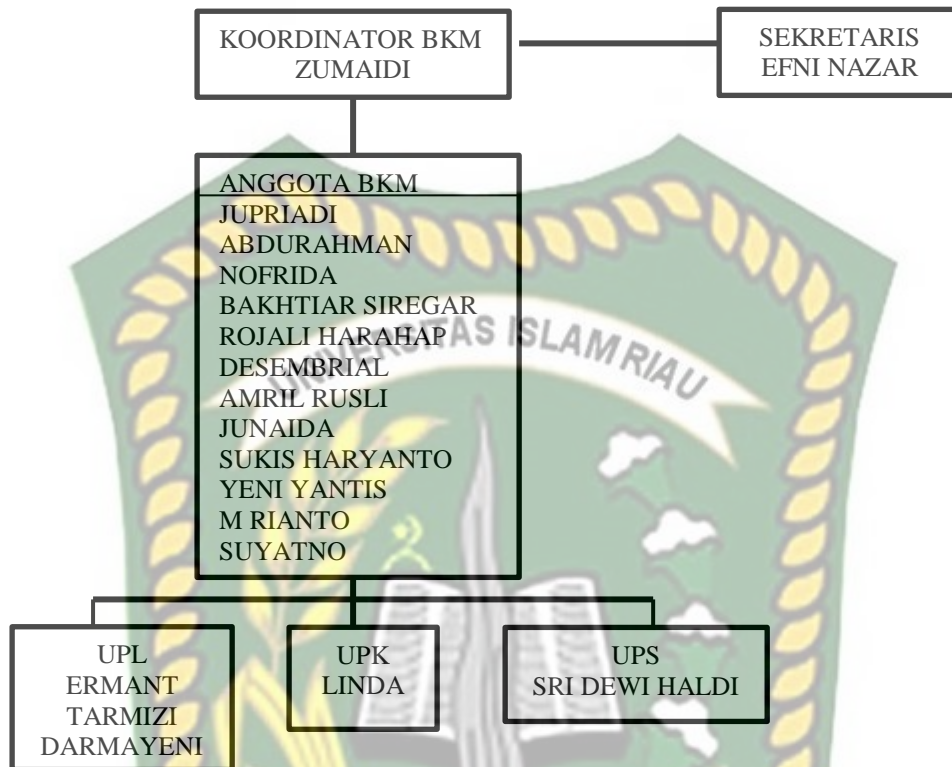
Pada awalnya, Kantor Kelurahan Duri Barat terletak di Jalan Bandes duri tepatnya di depan terminal angkot pasar Dewi Sartika, pada tahun 2011 Kantor Lurah tersebut mendapat persoalan dengan sipemilik tanah, dan pada akhirnya Kantor Kelurahan Duri Barat berpindah tempat dari Jl. Bandes ke Jl. Pertanian dengan menyewa rumah warga setempat. Sejak saat itu permintaan untuk pembangunan Kantor Baru diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Karena sempitnya rumah tempat sewa untuk kantor Lurah Duri Barat sehingga menghambat lancarnya pengurusan administrasi sehingga Pada tahun 2015 Kantor Lurah Duri Barat pindah dari Jl. Pertanian ke Jl. Tribrata juga menyewa rumah warga. Pada awal tahun 2016 Kantor Lurah Duri Barat pindah ke Bangunan resmi milik Pemerintah dengan menggunakan APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2015 yang terletak di Jl. Tribrata.

Pemerintah Kelurahan Duri Barat saat ini berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan, hal ini tidak terlepas dari kerjasama yang baik dari semua pihak, baik Lurah, perangkat Kelurahan, LPMK, RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh Pemuda dan segenap ibu-ibu Tim Penggerak PKK Kelurahan Duri Barat dan Lembaga lain sebagainya.

Visi: Mewujudkan Pelayanan Terbaik Kepada Masyarakat Kelurahan Duri Barat dengan meningkatkan Manajemen Pelayanan Prima dan Pembangunan Partisipatif.

Misi: Meningkatkan Kapabilitas dan Kompetensi Aparatur, Penguatan Kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan, Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan.

**Gambar IV.I Struktur Organisasi BKM Karya Maju Bersama Tahun 2018-2021**



Perjalanan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) mulai tahun 1999, yaitu sejak diluncurkannya program-program penanggulangan kemiskinan diperkotaan (P2PK). Program ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan di wilayahnya masing-masing. BKM sebagai perwakilan orang-orang baik di masyarakat, di harapkan dapat menjawab semua tantangan yang menghambat pembangunan mulai dari tingkat kelurahan/desa.

Sebelumnya masyarakat hanya dijadikan sebagai objek, yang jika dikontasikan, termasuk konotasi negatif. Betapa tidak, karena masyarakat dianggap tidak berdaya dan hanya bisa menerima apapun yang dijalankan oleh pemerintah daerah dan pusat. Dengan adanya P2PK, masyarakat dijadikan sebagai

subyek (pelaku langsung) dalam kegiatan pembangunan di kelurahan/desanya masing-masing.

Sebagai salah satu aset yang paling berharga dalam Program Kota Tanpa Kumuh (kotaku) yaitu Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah wadah berkumpulnya individu berjiwa relawan, bijak, transparan, akuntabel, amanah dalam mengoordinir penanganan kumuh, dan memiliki empati terhadap warga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). BKM adalah nama “generik”, dan dalam perjalanannya masyarakat boleh membentuk baru atau meneruskan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada, sesuai dengan prinsip dan nilai yang diusung, yaitu “terpercaya”

Bkm merupakan lembaga pimpinan kolektif organisasi masyarakat warga yang terdiri atas pribadi yang dipercaya warga berdasarkan kriteria nilai-nilai kemanusiaan yang disepakati bersama dan dapat mewakili himpunan warga dalam berbagai kepentingan. Keputusan dalam lembaga ini sendiri dilakukan secara kolektif melalui mekanisme rapat anggota NKM dengan mengadakan musyawarah menjadi norma utama dalam seluruh proses pengambilan keputusan.

Bkm mempunyai misi membangun kapital sosial dengan menumbuhkan kembali nilai-nilai kemanusiaan, ikatan-ikatan sosial dan juga menggalang solidaritas sosial sesama antar warga agar saling bekerja sama demi kebaikan, kepentingan, kebutuhan bersama, yang diharapkan kelak memperkuat kemandirian masyarakat untuk menuju tatanan masyarakat madani.

Dalam implementasinya, sebuah kebijakan BKM dilakukan secara teknis oleh Unit Pengelola. UPK sebagai Unit Pengelola Keuangan yang bertugas

menyalurkan keuangan kepada KSM melalui keputusan BKM. Ditambah dengan Unit Pengelolaan lingkungan, Unit Pengelolaan Sosial, membuat BKM cukup sebagai ‘catalytic agent’ yang cenderung berperan memberi arahan, tidak perlu menjalankan sendiri.

BKM bersama masyarakat merumuskan sistem dan strategi penyelesaian masalah pembangunan yang ada di Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dalam upaya membangun infrastruktur permukiman yang berskala lingkungan dan menjaga kualitas permukiman yang di dukung oleh perubahan perilaku masyarakat.

Berikut tugas Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah:

1. Melaksanakan penyaluran dana bantuan dana investasi (BDI) kepada KSM
2. Membuat surat perjanjian pemanfaatan dana lingkungan/sosial/ekonomi dengan KSM selaku pelaksana kegiatan
3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan
4. Memastikan penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial
5. Memfasilitasi penyelesaian pemersalahan yang mungkin muncul ditingkat kelurahan, termasuk memberikan sanksi/peringatan kepada KSM atas penyelenggaraan pemanfaatan dana atau penyelenggaraan atas ketentuan-ketentuan dalam SPPD-L/S/E

Setelah terbentuknya wadah BKM, selanjutnya kelembagaan inilah yang menggerakkan seluruh masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan/desa. Mulai dari merencanakan, melaksanakan hingga mempertanggung jawabkan hasilnya

kepada masyarakat atau dengan kata lain, program ini adalah program dari, oleh, untuk rakyat.

Kelurahan Duri Barat memiliki satu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), BKM memiliki beberapa unit pengelola dibawahnya seperti unit pengelola keuangan (UPK), unit pengelola lingkungan (UPL), kesekretarian.

UPK membantu masyarakat yang menjadi anggota KSM yang ingin mengajukan pembiayaan. Penilaian layak atau tidaknya proposal usaha yang diajukan oleh anggota KSM untuk mendapatkan pembiayaan dilakukan oleh UPK. Setelah layak menurut UPK baru pembiayaan tersebut bisa dilanjutkan dan dibawa ke pertemuan mingguan. Upk juga memiliki kewajiban untuk mendampingi dan membina KSM yang ada di desa setempat.

Untuk bisa mendapatkan program keuangan mikro syariah (KMS) masyarakat harus membentuk kelompok yang biasa disebut dengan istilah kelompok swadaya masyarakat (KSM), KSM yaitu kelompok kecil dari masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan kepada KMS yang anggotanya minimal lima orang. KSM inilah yang nanti melakukan pertemuan dengan fasilitator dan UPK yang nanti melakukan pelatihan wajib ksm. Pada saat pelatihan tersebut diperkenalkanlah kepada anggota ksm tentang riba, akad-akad yang digunakan pada program.

Berikut tugas Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Unit Pelaksana Lingkungan, Kelompok dan Sosial:

1. Menyusun proposal kegiatan infrastruktur/sosial/ekonomi yang sudah disepakati bersama jenis kegiatan dan lokasinya



2. Melengkapi proposal dengan instrumen/dokumen/rencana pengelolaan lingkungan dan sosial
3. Mengelola dan melaksanakan kegiatan kotaku secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan,serta memastikan prasarana dan sarana yang dibangun tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial
4. Detail tugas KSM di bidang infrastruktur, sosial, dan ekonomi diatur dalam petunjuk teknis penyelenggaraan kotaku tingkat masyarakat



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Identitas responden merupakan keterangan yang diperoleh peneliti dari responden melalui wawancara dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas dan akurat mengenai Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) DiKelurahan Duri Barat Kecamatan Maandau Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini melakukan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara, pengumpulan Dokumentasi dan Observasi.

Peneliti berhasil mendapatkan informan kunci di Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Berikut responden yang peneliti temui di Kelurahan Duri Barat.

**Tabel V.I: Identitas Key Informan Kelurahan Duri Barat**

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Jabatan
1	Ramadhan, S.STP	Laki-laki	40 Tahun	Kepala Seksi kesejahteraan sosial
2	Surasni	Perempuan	42 Tahun	Askot Mandiri
3	Zumaidi	Laki-laki	52 Tahun	Koordinator BKM

*Sumber data: Data Olahan Penulis, 2022*

Berdasarkan tabel diatas, yang menjadi key informan yang dipilih penulis dari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau berjumlah tiga orang. Yang menjadi key informan dalam penelitian Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (kotaku) diKelurahan Duri Barat ini yaitu Bapak Ramadhan, selaku Kepala Seksi.

Key informan selanjutnya adalah ibu Surasni selaku Askot Mandiri, lalu Bapak Jumaidi selaku kepala Koordinator BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)

**Tabel.V.II: Identitas Informan Masyarakat Terdampak Program KOTAKU**

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Pekerjaan
1	Ertati Nur	Perempuan	52 Tahun	SMA	IRT
2	Sumiati	Perempuan	53 Tahun	SMP	Pedagang
3	Marlini	Perempuan	48 Tahun	SMA	IRT
4	Nurul	Perempuan	47 Tahun	SMA	IRT
5	Herni	Perempuan	50 Tahun	SMA	IRT
6	Yusmawati	Perempuan	55 Tahun	SMP	Pedagang
7	Dar	Perempuan	54 Tahun	SMA	IRT

*Sumber data: Data Olahan Penulis, 2022*

Melihat identitas informan yang telah penulis jabarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah cukup berkompeten untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menjawab masalah penelitian ini disamping itu informan dalam penelitian ini adalah mereka yang menurut penulis mampu untuk memberikan informasi tentang evaluasi dampak program kota tanpa kumuh (kotaku) dikelurahan duri barat kecamatan mandau kabupaten bengkalis.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (kotaku), penulis juga melakukan wawancara

kepada masyarakat yang berada di sekitaran tempat program kotaku itu dibangun, informan masyarakat yang dipilih oleh peneliti berjumlah tujuh orang.

### **B. Analisis Dan Pembahasan Penelitian Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) DiKeluarah Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis**

Sebagaimana diketahui bahwa KOTAKU merupakan program yang menitik beratkan pada peningkatan akses masyarakat dalam infrastruktur dasar, seperti akses air bersih, sanitasi, jalan lingkungan, pengelolaan sampah, dengan cara melakukan sinergi dan pendekatan antara pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, penguatan peran pemerintah daerah sebagai “nakhoda” dan menjadikan kolaborasi sebagai platform. Yaitu, kolaborasi antara Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan pemerintah pusat maupun kolaborasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Pemda itu sendiri, dengan perusahaan melalui kemitaaan, dan juga dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Evaluasi dapat dilakukan oleh pelaksana program (pemerintah) yang tujuannya sebagai umpan balik untuk memperbaiki konsep maupun kebijakan program, dan dilakukan oleh tim independen untuk melihat sampai sejauh mana efektivitas dan ketepatan ssaran program yang perlu doketahui oleh publik. Pada dasarnya, evaluasi akan dilaksanakan oleh seluruh pelaku sesuai kebutuhan yang menjadi tujuan program/kegiatan. Evaluasi dapat dilaksanakan secara berkala, baik evaluasi saat perencanaan, evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dan evaluasi untuk melihat dampak program.

Evaluasi dampak mempunyai ciri berfokus pada efek langsung dari program, serta memutuskan seberapa baik sasaran telah terpenuhi. Sementara itu evaluasi hasil mempunyai ciri berfokus pada efek jangka panjang dari program tersebut, serta memutuskan seberapa baik tujuan telah tercapai. Maka evaluasi outcome atau evaluasi hasil adalah termasuk evaluasi sumatif, karena dilakukan setelah suatu program selesai dilaksanakan.

Evaluasi dampak mengukur secara bersih yang disebabkan oleh adanya suatu program tertentu metodologis dan evaluasi dampak tidak hanya memandang dari segi hasil saja, tetapi juga perubahan yang akan muncul sebagai dampak dari program itu sendiri.

Untuk dampak mempunyai arti yaitu perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output. Akibat dari hasil output ada dua macam yaitu:

1. Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran (baik akibat yang diharapkan atau tidak diharapkan) dan akibat tersebut mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran (impact).
2. Akibat yang dihasilkan suatu intervensi program pada kelompok sasaran, baik yang sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, dan akibat tersebut tidak mampu menimbulkan perilaku baru pada kelompok sasaran (impact).

Untuk memastikan dan mengendalikan tercapainya tujuan dan sasaran penanganan kawasan permukiman kumuh, diperlukan Evaluasi yang efektif dan efisien. Pentingnya Evaluasi dalam program KOTAKU yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Duri Barat agar

dapat mengetahui sejauh manakah keberhasilan pelaksanaan program KOTAKU dalam mengurangi kawasan kumuh di Kelurahan Duri Barat ini. Sehingga pelaksanaan program Kotaku di tahun-tahun berikutnya dapat berjalan dengan efektif.

Untuk mengetahui sejauh mana Evaluasi Dampak program KOTAKU di Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ini peneliti melakukan wawancara kepada responden dengan Model Evaluasi Dampak menurut Anderson (Irfan Islami 1984:115) dengan indikator-indikator yang sangat berpengaruh dan menentukan sejauh mana Dampak yang di rasakan oleh masyarakat mengenai program Kotaku ini yaitu :

1. Dampak kebijakan yang diharapkan
2. Dampak kebijakan yang tidak diharapkan

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara satu persatu dari setiap penilaian yang telah diberikan informan terhadap pertimbangan yang telah disajikan agar data yang dihasilkan dapat secara mudah dipahami dan di mengerti.

#### **1. Dampak kebijakan yang diharapkan**

Dampak kebijakan yang diharapkan maupun tidak diharapkan baik pada problemnya maupun pada masyarakatnya. Dampak kebijakan yang diharapkan dalam pengembangan program Kota Tanpa Kumuh (kotaku) di Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang dibangun di setiap wilayah yang ditentukan. Selain itu, dampak

yang tidak diharapkan yaitu adanya beberapa masyarakat yang bandel dan acuh terhadap lingkungan rumahnya.

Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses/siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu dievaluasi. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan apakah dilanjutkan atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau bahkan harus diberhentikan. Evaluasi juga menilai keterkaitan antara teori kebijakan dengan prakteknya dalam bentuk dampak kebijakan, apakah dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak bagi masyarakat yang dituju. Secara normatif fungsi evaluasi sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggung jawaban publik, terlebih di masa masyarakat yang makin kritis menilai kinerja pemerintah.

Sejak dilaksanakannya program Kota Tanpa Kumuh (kotaku) di Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ini sudah dilaksanakannya dan banyak sekali perubahan, baik dari perbaikan dreinase hingga pengadaan air bersih dan sanitasi berbasis pemberdayaan. Berdasarkan saat observasi masih banyaknya jalan penghubung dalam kondisi rusak dan keadaan jalan lingkungan yang kumuh dan gersang dan penerangan atau lampu jalan yang kurang sehingga menyebabkan banyak masalah.

Program KOTAKU di Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ini ditujukan sepenuhnya untuk seluruh masyarakat.

Program tersebut diantaranya berupa penanganan permukiman kumuh, peningkatan kualitas kumuh. Item penilaian dari indikator dampak kebijakan yang diharapkan:

**a. Terwujudnya Permukiman Perkotaan yang Layak Huni, Produktif dan Berkelanjutan**

Berkembangnya permukiman kumuh (slum-squatter) di perkotaan tidak terlepas dari terbatasnya kawasan hunian yang layak bagi seluruh penduduk didukung dengan faktor bertambahnya penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan sebagai akibat perkembangan dan penambahan penduduk alami kota. Permukiman kumuh adalah sebuah satuan kehidupan atau komuniti yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas sosial dan budaya yang jelas. Secara sosial dan ekonomi, sebuah komunitas permukiman kumuh bersifat heterogen. Akibat yang timbul dari berkembangnya kawasan kumuh tidak hanya menyangkut pada kualitas hunian penduduk secara fisik, tetapi juga ancaman tercemarnya lingkungan, merebaknya kasus kriminal, hingga ketidokraturan penataan kota, sehingga diperlukan suatu upaya dalam menanggulangi dan memperbaiki kawasan kumuh yang terdapat di wilayah perkotaan.

Penanganan terhadap permukiman kumuh harus cepat disikapi, karena apabila keadaan ini terus dibiarkan, maka pelayanan dasar publik di wilayah perkotaan akan semakin terbatas dan pertumbuhan permukiman kumuh menjadi semakin pesat. Ditjen Cipta Karya (DJCK) Kementerian PUPR mencetuskan Program KOTAKU sebagai program pencegahan dan peningkatan kualitas



permukiman kumuh yang layak huni, produktif dan berkelanjutan dengan berkolaborasi bersama masyarakat sebagai pelaku penanganan wilayah kumuh.

Untuk mengetahui sub indikator diatas, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Zumaidi selaku ketua Koordinator BKM dan juga sekaligus sebagai RW 04 Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis beliau memaparkan jawaban:

*“untuk upaya yang berkelanjutan sendiri kita seperti melakukan imbauan melalui surat edaran atau wa group jadi kayak tolong ibu-ibu yang didepan rumahnya gitukan tolong partisipasinya, kesadaran dirinya untuk membersihkan lingkungan disekitarnya gitu, jadi kita ada wa groupnya, rata-rata kita punya per rt/rwnya, dan ada yang bagus responya, ada yang acuh tak acuh aja kan biasalah banyak warga yang bandel juga kan”*

*(Wawancara, Minggu, 20 Februari 2022, Pukul 17.03 Wib)*

Selanjutnya peneliti mewawancarai Ibu **Yusmawati** sebagai warga dan pedagang yang berada di Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis beliau mengatakan bahwa:

*“paling kami disini dek karna sudah bersihkan ya per masing-masing warga aja lagi untuk membersihkan lingkungan sekitar rumah kan, atau ga diingatkan sewaktu jumat berkah perminggu atau waktu wirit bulanan aja nanti per rt/rwnya”*

*(Wawancara, Kamis, 24 Februari 2022, Pukul 15.02 Wib)*

Selanjutnya peneliti mewawancarai dengan pertanyaan yang sama kepada Ibu **Dar** sebagai salah satu warga di Kelurahan Duri Barat beliau mengatakan:

*“benar, sekarang jalanya sudah enak tidak berdebu dan tidak becek, tidak adalagi lobang-lobang kan, terus juga di cat-cat ginikan jadi tambah kelihatan bersihnya, yang biasanya sampah berserakan sekarang udah gak, buang sampahnya ya perindividu masing-masing rumah saja ya kesadaran diri tiap-tiap rumah aja paling mbak”*

*(Wawancara, Kamis, 24 Februari 2022, Pukul 15.02 Wib)*

Berdasarkan hasil observasi dilapangan yang peneliti lakukan dalam penelitian Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (kotaku) di Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasanya program KOTAKU ini sudah berupaya sebaik mungkin dengan cara membangun solidaritas antar sesama warga untuk mencapai keberhasilan program KOTAKU yang tujuan akhirnya ingin menuntaskan 100% air bersih, 0% pemukiman kumuh dan 100% sanitasi di setiap kelurahan.

Program KOTAKU adalah program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Tujuannya untuk menurunkan luas permukiman kumuh, meningkatkan penghasilan masyarakat, terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat permukiman kumuh.

Menurut PERMENPERA (2008), permukiman layak huni adalah lingkungan hidup diluar kawasan lindung, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum dengan penataan sesuai dengan standar dan tata ruang yang berlaku serta menjamin kesehatan masyarakat. Rumah layak huni merupakan kebutuhan dasar manusia untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Seperti daerah Kelurahan Duri Barat yang sudah peneliti lakukan dengan menyimpulkan permukiman dapat terhindar dari kondisi kumuh dan tidak layak

huni jika pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar yang berlaku dan terdapat rumah layak huni yang bersih dan nyaman, yang tadinya jalannya hanya tanah kuning sekarang sudah disemen, yang dulunya banyaknya genangan air akibat hujan yang sekarang bisa dilewati tanpa harus mengnyinsingkan celana dan sekarang sudah terbebas dari banjir, kotor dan beceknya jalan dan juga sudah dapat menyejukan mata pandangan. Dengan adanya program ini maka hal-hal tersebut dapat terwujudnya adanya program ternyata dapat diwujudkan di lingkungan Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Berharap ini merupakan awal dalam rangka menciptakan lingkungan yang sudah bersih, sehat dan bisa untuk menopang kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Menurut Riyanto dalam (Elbandiansyah 2019:250) secara teknis produktifitas adalah suatu perbandingan antara hasil dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang diperlukan (input) seperti yang peneliti telah simpulkan bahwa dengan adanya sumur bor atau air bersih maka masyarakat terhindar dari pengeluaran yang lebih besar dengan demikian pengeluaran yang semestisnya yang biasanya digunakan untuk air bersih bisa disimpan sebagai tabungan, nah dari tabungan yang dilakukan oleh masyarakat diharapkan dapat digunakan sebagai modal yang mungkin suatu saat digunakan untuk membangun usaha yang diharapkan kemudian terjadi empowerment ekonomi keluarga sehingga kemudian bisa usaha tadi itu semakin hari mungkin semakin besar suatu saat diharapkan dapat menopang ekonomi keluarga dalam rangka keberlanjutan kesejahteraan yang ada dalam masyarakat.

Memang diakui bahwa konsep keberlanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks, sehingga pengertian keberlanjutanpun sangat multidimensi dan multi-interpretasi. Menurut Heal, (Fauzi, 2004). Konsep keberlanjutan ini paling tidak mengandung dua dimensi : Pertama adalah dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Kedua adalah dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan.

Mengingat keragaman tujuan dan keinginan masyarakat dalam keberlanjutan program KOTAKU di Kelurahan Duri Barat ini tanpa mengesampingkan aspek-aspek yang dapat membantu mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu dari segi Aspek ekonomi, social dan lingkungannya. Apabila aspek ekonomi, social dan lingkungannya semakin membaik maka dapat dikatakan berhasil program tersebut. Sebaliknya jika aspek ekonomi, social dan lingkungannya tidak ada perubahan atau menjadi semakin buruk maka program tersebut dapat dikatakan gagal atau tidak berhasil.

Kondisi pemukiman kumuh pasca pelaksanaan program kotaku di Kelurahan Duri Barat sesuai dengan karakteristik pemukiman kumuh yang dikemukakan kalangan ahli antara lain, jalan-jalan yang sempit sehingga tidak dapat akses atau dilalui oleh roda empat, fasilitas dreinase yang tidak memadai dan bahkan terdapat jalan-jalan yang tidak memiliki dreinase sehingga apabila hujan kawasan tersebut tergenang oleh air, fasilitas pembuangan kotoran/tinja sangat minim. Daerah pemukiman dengan lingkungan yang tidak sehat, daerah yang dihuni oleh warga kota yang gagal dalam ekonomi, fasilitas umum yang

kondisinya kurang atau tidak memadai, kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan ruang-ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin, adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di permukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.

Tujuan yang paling mendasar dari program kotaku khususnya di Kelurahan Duri Barat adalah pengentasan pemukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen (sasaran RPJMD 2015-2019), ataukah mewujudkan konsep “100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum dan sanitasi, serta 0 persen pemukiman kumuh, dan 100 persen hibah sanitasi melalui penanganan kumuh yang meliputi aspek pembangunan infrastruktur dan pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh (pedoman teknis program kotaku,2016). Atas dasar itu maka perubahan, dampak yang dihasilkan dari penanganan pemukiman kumuh dalam pelaksanaan program kotaku sangat diharapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap perubahan-perubahan manfaat dan dampak yang ditimbulkan atau diciptakan oleh program kotaku di Kelurahan Duri Barat atas manajemen penanganan permukiman kumuh yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016 sampai tahun 2019.

Temuan hasil penelitian terhadap beberapa indikator menunjukkan bahwa evaluasi perubahan, manfaat dan dampak program kotaku menunjukkan aneka ragam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat lokal dan lingkungan

permukiman Kelurahan Duri Barat belum sepenuhnya terentaskan atau teratasi dengan baik dan benar serta maksimal oleh program Kotaku. Perubahan yang dominan menonjol adalah pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana dasar terutama jalan lingkungan, drainase, dan sumur bor.

#### **b. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

Partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi program KOTAKU merupakan unsur penting yang sering dilupakan. Sebab, tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Disamping itu pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap pembangunan program yang akan datang.

Masyarakat yang ikut serta dalam mendukung program KOTAKU tidak hanya berpartisipasi dalam bentuk uang, tenaga, dan lain-lain namun juga ikut serta dalam keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat yang dilakukan oleh pihak panitia pelaksana namun keikutsertaan tersebut hanya perwakilan dari masing-masing ketua RW/RT. Sejah mana masyarakat diberi sosialisasi akan pengetahuan tentang mengevaluasi program KOTAKU dan penetapan program-program yang secara tidak langsung akan memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk saran. Pada dasarnya masyarakat haruslah terlibat secara langsung dalam suatu kegiatan proyek pembangunan agar berjalan dengan sebagaimana mestinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program KOTAKU adalah salah satu faktor pendukung keberhasilan program KOTAKU.

Hasil wawancara peneliti bersama key informan Bapak Ramadhan, S.STP selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Duri Barat, beliau memberikan informasi bahwa:

*“program KOTAKU ini sendiri banyak sekali kegiatannya dan memang dari segi yang kita ambil itu sesuai data baseline. Intinya program KOTAKU ini semua untuk masyarakat juga. Diantaranya kita punya program untuk penyediaan air bersih, sumur bor, dreinase, jalan, septitank komunal. Mengapa dititik itu dibangunnya ya karena dilihat dari orang program KOTAKU sendiri di Kelurahan Duri Barat memang disitu tak layak atau kumuh jadi dibuatlah program itu dititik yang telah ditentukan, jadi program KOTAKU ini mengubah lingkungan-lingkungan kumuh menjadi layak untuk dihuni, kamipun dari kelurahan ini hanya mendampingi lokasinya dan penyediaan infrastruktur saja”*  
(Wawancara: Selasa, 8 Februari 2022, Pukul 14:17 Wib)

Peneliti sebelumnya sudah melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama dengan Ibu Surasni selaku Askot Mandiri atau Penanggung Jawab Kabupaten Bengkalis, kemudian beliau memberikan jawaban sebagai berikut:

*“ya tujuannya untuk masyarakatlah, dikarenakan masyarakat butuh disana, itu buktinya dibangun, kitakan juga mengkaji atas dasar data baseline, misalnya permasalahan di rt/rw itu apa, misalnya permasalahan jalan berarti jalanya yang kita bangun, kalau permasalahannya dreinase mungkin karena banjir atau apa ya kita bangun parit, ibaratnya kita membangun itu kitakan mendata dulu udah dapat data itukan terlihat apa yang mereka butuhkan, data itulah yang di SK kan, kita bukan proyek yang asal bangun, gak, tapi itu dengan masyarakat yang mendata rt/rw bersama warga setempat dan dapatlah permasalahannya”*  
(Wawancara: Kamis, 10 Februari 2022, Pukul 13:45 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Ramadhan, S.STP selaku kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Duri Barat dan Ibu Surasni sebagai Askot Mandiri dan penanggung jawab sekabupaten Bengkalis dapat diketahui bahwa tujuannya dibangun untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat tidak hanya mengatasi kekumuhan yang sudah ada namun juga untuk mencegah tumbuhnya kekumuhan baru.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan kepada key informan Bapak Zumaidi selaku ketua Koordinator BKM dan juga sekaligus sebagai RW 04 Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis memberikan informasi sebagai berikut:

*“kalau yang saya rasakan ya pasti mungkin lebih bersih dari yang sebelumnya, itu pastikan, kemudian lebih rapi dan tertata saja sih, juga nyaman biasanya sampah berserakan sekarang sudah ga”*  
(Wawancara, Minggu, 20 Februari 2022, Pukul 17:03 Wib)

Dari kutipan wawancara dengan Bapak Zumaidi selaku ketua koordinator BKM beliau merasakan kenyamanan dan betah untuk berada dirumah. Ada banyak manfaat yang bisa dirasakan seseorang dengan menjaga lingkungan mereka tetap rapi dan bersih.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lingkungan yang bersih merupakan dambaan semua orang. Namun tidak mudah untuk menciptakan lingkungan kita bisa terlihat bersih dan rapi sehingga nyaman untuk dilihat. Tidak jarang karena kesibukan dan berbagai alasan lain, kita kurang memperhatikan masalah kebersihan lingkungan di sekitar kita, terutama lingkungan rumah.

Menjaga kebersihan serta kesehatan lingkungan rumah menjadi tanggungjawab masing-masing individu. Meski faktor lain di luar lingkungan rumah juga mempengaruhi kondisi kebersihan maupun kesehatan tubuh, tapi lingkungan rumah termasuk paling inti dan pertama harus dijaga lebih dulu.



Terkait masalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut Friedlander dalam Suud (2006:8) beberapa indikator kesejahteraan sosial yang perlu diamati dalam program kota tanpa kumuh di Kelurahan Duri Barat ini dimaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan dan dengan hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada masyarakat setempat untuk memperkembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Indonesia merupakan bagian dari negara kesejahteraan, maka segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial warga negaranya, serta memberikan perlindungan sosial kepada kelompok rentan atau lanjut usia sehingga dapat mempertahankan kesejahteraan sosial bagi warganya. Kondisi kesejahteraan terjadi manakala kehidupan manusia aman, nyaman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi serta, manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya. Kesejahteraan masyarakat ialah tercukupinya kebutuhan hidup masyarakat atau kepuasan masyarakat akan fasilitas yang diberikann oleh pemerintah baik dibidang ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya.

Kondisi kesejahteraan terjadi manakala kehidupan manusia aman, nyaman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi serta, manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya. Kesejahteraan

masyarakat ialah tercukupinya kebutuhan hidup masyarakat atau kepuasan masyarakat akan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah baik dibidang ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya.

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi dimana masyarakat dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat damai dan untuk mencapai kondisi itu perlu suatu usaha yang dilakukan hal-hal yang harus diperhatikan dalam kesejahteraan masyarakat salah satunya yaitu keadaan tempat tinggal yang layak. Pemerinthaan Kelurahan Duri Barat membangun program kota tanpa kumuh (kotaku) ini dengan tujuan untuk memberikan penanganan pemukiman kumuh dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pengimplementasiannya dalam mengedepankan partisipasi masyarakat.

### **c. Meningkatkan Nilai Sosial Masyarakat**

Dalam kehidupan bermasyarakat ada sejumlah nilai sosial yang dianut masyarakat secara umum. Nilai-nilai sosial ini yang kemudian mengatur mereka dalam berhubungan atau berinteraksi sosial mencakup perilaku, ucapan, dan lain sebagainya yang diharapkan bisa meningkatkan keharmonisan dalam bersosialisasi. Nilai sosial ini kemudian menjadi faktor penting yang harus dipahami dan dipraktekkan oleh masyarakat luas.

Kebutuhan akan rumah atau tempat tinggal adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, karena hal ini merupakan tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas, sebagai tempat berlangsungnya proses sosialisasi (proses dimana

seseorang individu diperkenalkan kepada nilai, adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat), dan juga untuk pembentukan watak dan kepribadian bangsa.

Untuk mengetahui nilai-nilai sosial yang berada di kawasan Kelurahan Duri Barat ini, maka peneliti melakukan wawancara Ibu **Surasni** selaku Askot Mandiri atau Penanggung Jawab Kabupaten Bengkalis, kemudian beliau memberikan jawaban sebagai berikut:

*“Agar keberlanjutan dari kegiatan sosial itu sendiri bisa terjamin, upaya yang bisa dilakukan mungkin yang pertama itu ada sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan untuk menggugah kesadaran dan kepedulian masyarakat, terutama melalui media pertemuan rutin yang ada di setiap kelompok masyarakatnya, terus mendorong komitmen dan teladan dari pelaku dan tokoh masyarakat termasuk konsultan/fasilitator sebagai agen pendorong perubahan, lalu menyusun program yang kreatif dan inovatif sesuai budaya dan kearifan lokal dan juga untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi, lalu menjembatani sinergi antarlembaga di tingkat masyarakat untuk menguatkan perubahan sosial yang dicita-citakan”*  
(Wawancara:Kamis,10 Februari 2022,Pukul 13:45 Wib)

Peneliti sebelumnya sudah melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak **Zumaidi** selaku ketua Koordinator BKM dan juga sekaligus sebagai RW 04 Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis beliau menjelaskan:

*“mungkin himbauan ya,berupa pendekatanlah, masa iya gitukan orang lain tidak dapat apa-apa kita dapat jalan yang bersih dan ter tata gini masa ga dipelihara, Cuma agak berat himbauanya tadikan berulang-ulang, ya maklumlah dari sekian warga itu ada juga yang bandel tidak mau peduli, lebih cenderung himbauanlah atau pendekatan saja, kebetulan himbauan itu dari saya kebetulan saya rw sekaligus koordinator program KOTAKU ini kan , kalau saya ketempat lain saya hubungi rwnya atau rtnya karena untuk wilayah lain saya ga ada kuasakan jadi saya panggil rw/rt nya saja,ya memang program ini sangat berperan sekali dalam memberdayakan masyarakat”*

(Wawancara, Minggu, 20 Februari 2022, Pukul 17.03 Wib)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu **Sumiati**, beliau mengatakan:

*“setiap kegiatannya ni ada berupa gotong royong bersama untuk mewujudkan lingkungan bersih ni aja mbak paling himbauan dari setiap rwnya lah”*

(Wawancara, Kamis, 24 Februari 2022, Pukul 14.36 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara bersama key informan dan informan dapat diketahui bahwa untuk meningkatkan nilai sosial masyarakat dalam mensukseskan kegiatan sosial sendiri tengah membentuk kelompok untuk pelaksanaan bakti sosial. Dengan semangat kepedulian yang sudah melekat dihati setiap warga yang berada di wilayah porgram KOTAKU ini di bawah bimbingan fasilitator kelurahan Duri Barat terus berkomitmen melalui rapat rutin setiap bulannya untuk mewujudkan kepedulian melalui bakti sosial dengan cara bergotong royong.

Nilai-nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buurk oleh masyarakat. Nilai sosial juga berfungsi sebagai penentu terakhir manusia dalam memenuhi peranan-peranan sosial. Nilai sosial dapat memotivasi seseorang untuk mewujudkan harapan sesuai dengan peranannya. Nilai sosial juga berfungsi sebagai alat solidaritas dikalangan anggota kelompok masyarakat. Nilai sosial juga berfungsi sebagai alat pengawas (control) perilaku manusia dengan daya tekanan dan daya mengikat tertentu agar orang berperilaku sesuai dengan nilai yang dianutnya. Nilai sosial menurut Robin Wiliams adalah hal-hal yang menyangkut

kesejahteraan bersama melalui konsensus yang efektif di antara mereka, sehingga nilai-nilai sosial dijunjung tinggi oleh banyak orang.

Berdasarkan observasi dilapangan yang telah peneliti lakukan dalam penelitian Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (kotaku) diKelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ini dapat dilihat bahwa dampak kebijaksanaan terhadap situasi atau orang-orang yang bukan menjadi sasaran/tujuan utama pada kegiatan sosial yang dilakukan sangat baik dan warga cukup patuh akan himbauan yang diberikan walaupun ada sebagian warga yang tidak peduli akan lingkungannya sendiri padahal program KOTAKU ini di bangun untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Dari uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan, betapa pentingnya sosialisasi dalam suatu kegiatan. Artinya, ketika sosialisasi tersebut tidak berjalan dengan baik, maka yakinlah bahwa program tidak akan berhasil.

#### **d. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat**

Peningkatan atau meningkatkan adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mendapatkan keterampilan atau kemampuan menjadi lebih baik sedangkan perekonomian yang mempunyai kata dasar ekonomi yaitu pengertian tindakan, aturan atau cara tentang mengelola ekonomi rumah tangga dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pengembangan ekonomi lokal menjadi prasyarat kunci untuk memperbaiki kondisi ketertinggalan dan ketimpangan penghidupan kelompok Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR) yang umumnya dimanifestasikan oleh rendahnya kemampuan ekonomi dan akses mereka terhadap permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Secara umum kelompok MBR tersebut dapat bertahan hidup di kawasan permukiman kumuh dengan mengandalkan pada kegiatan usaha skala mikro dan pekerja rendahan/buruh.

Untuk mengetahui lebih lanjut lagi, peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Zumaidi selaku ketua Koordinator BKM dan juga sekaligus sebagai RW 04 Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis mengenai meningkatkan ekonomi masyarakat beliau menjelaskan:

*“sangat membantu sekali dek, apalagi semenjak adanya sumur bor ini kehidupan masyarakat disini berubah dulunya pemukiman ini tandus dan gersang sekarang mulai menghijau dengan tanaman-tanaman ataupun bunga-bunga yang menghiasi di depan rumah warga, dulu sebelum sumur bor dibangun kami terpaksa berjalan kaki hingga 1 kilometer untuk mendapatkan air itupun dari sisa galian sumur warga nimba airnya lagi”*  
(Wawancara, Minggu, 20 Februari 2022, Pukul 17.03 Wib)

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan Ibu **Ertati Nur** sebagai masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan program KOTAKU Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis beliau mengatakan:

*“wah bagus sekali mbak, dulu sebelum ada sumur bor ini kan kami sulit untuk mendapatkan air bersih, setelah adanya sumur bor ini sangat membantu kami dan juga mempermudah kami walaupun kualitasnya ga sebagus air pdam tapi lumayanlah sudah bisa di konsumsi udah bisa mandi dan mencuci, kami tidak lagi membeli air juga terbantu lah sedikit dalam segi ekonomi kami”*  
(Wawancara, Kamis, 24 Februari 2022, Pukul 14:17 Wib)

Adapun hasil wawancara dengan Ibu **Sumiati** sebagai masyarakat dan sekaligus pedagang yang juga bertempat tinggal di kawasan program KOTAKU beliau memberikan informasi:

*“sangat membantu dek , karenakan kebutuhan akan air bersih itu banyak untuk kehidupan sehari-hari aja itu sangat dibutuhkan kayak mandi, mencuci, memasak, menyiram tanaman itu semua kan perlu air,gak harus berjalan jauh dulu pake gerobak untuk dapatkan air itu sekarang kan udah dibangun sumur bor juga dialirkan ke tiap-tiap rumah warga jadi gampang ga memakan banyak waktu juga ga menghambat aktifitaslah”*  
(Wawancara,Kamis,24 Februari 2022,Pukul 14.17 Wib)

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan keyinforman dan informan dapat dilihat bahwa Program KOTAKU di Kelurahan Duri Barat ini dalam kegiatan pembangunan sumur bor sangat amat membantu para warga setempat yang dulunya kesulitan akan air bersih . Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktifitas mereka sehari-hari.

Demi menjaga ketersediaan air bersih tersebut, program KOTAKU Kelurahan Duri Barat memberikan pembangunan infrastruktur energi berupa pembangunan sumur bor untuk daerah yang mengalami krisis air dan daerah-daerah yang tertinggal. Dengan harapan, ketersediaan air bersih mampu menunjang pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.

Analisis peneliti berdasarkan observasi lapangan dan wawancara yang peneliti lakukan untuk indikator dampak kebijaksanaan yang diharapkan maupun tidak diharapkan antara kegiatan infrastruktur yang dibangun dengan masyarakat setempat merasakan puas dengan adanya pembangunan sumur bor terutama dapat

mempermudah segala aktifitas mereka seperti kebutuhan air untuk memasak, toilet, mencuci pakaian, mencuci piring, membersihkan rumah, mandi, mencuci kendaraan, dan menyiram pekarangan di banding dengan yang dulunya sulit menemukan air bersih dengan menempuh perjalanan yang cukup jauh sekarang mereka cukup dirumah saja.

Jadi dengan demikian untuk meningkatkan keberhasilan tercapainya program KOTAKU di Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ini adalah peningkatan kapasitas. Karena secara tidak langsung, peningkatan kapasitas akan mengantarkan kepada tercapainya tujuan program secara maksimal. Peningkatan kapasitas bertujuan membangun gerakan bagi pemerintah daerah(pemda) dan masyarakat melalui perubahan perilaku kolektif dalam kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman. Peningkatan kapasitas atau pelatihan dilakukan ditingkat kelurahan/desa.

Peningkatan pendapatan masyarakat merupakan bagian dari penyelenggaraan pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya kepada semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali termasuk didalamnya pembangunan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat antara lain berkisar tentang bagaimana mengupayakan masyarakat dapat menjadi pelaku utama dalam pembangunan ekonomi serta dapat memanfaatkan sumberdaya secara optimal dan bertanggung jawab dengan masyarakat mulai dan mempunyai kamauan, daya kekuatan serta peningkatan kemampuan memanfaatkan potensi yang dimilikinya.

Menurut Adam Smith dalam (KBBI) ilmu ekonomi merupakan ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk



mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dalam konteks penelitian ini beberapa wawancara yang informan lakukan dalam masalah meningkatkan ekonomi masyarakat dalam program kota tanpa kumuh (kotaku) di Kelurahan Duri Barat ini seseorang menyatakan dengan adanya program kotaku ini merasa menjadi terbantu dalam segi ekonominya dari yang sebelumnya tidak memiliki air bersih sekarang sudah punya air bersih dan bisa digunakan kapan saja tanpa ada batasan dan untuk itu masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya lebih besar, bagi masyarakat ini adalah sebuah peningkatan yang sangat berarti.

## **2. Dampak kebijakan yang tidak diharapkan**

Dampak kebijakan ini bisa positif atau bisa pula negative. Pembangunan jalan disebagian wilayah Kelurahan Duri Barat melalui program KOTAKU ini memberi dampak positif bagi masyarakat yang berada disekitarnya. Adanya jalan tersebut memudahkan akses masyarakat menjadi mudah dan cepat dengan kondisi jalan yang sudah di aspal dengan baik. Dampak negatifnya adalah dengan adanya pembangunan jalan ini cukup sempit sehingga kendaraan beroda empat seperti mobil tidak dapat melaluinya.

Pada evaluasi mengenai dampak kebijaksanaan terhadap situasi ini evaluasi sendiri merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengetahui dan menilai apakah program kota tanpa kumuh (kotaku) tersebut mampu mewujudkan sesuatu yang diinginkan dalam rencana program tersebut. Dengan kata lain, evaluasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan aktifitas penilaian apakah sebuah program telah berhasil atau belum, dan apakah yang terjadi sesudah

program dilaksanakan betul-betul merupakan dampak program secara langsung ataukah karena hal lainnya.

Kegiatan KOTAKU yang sudah dilaksanakan di RT01/RW04 Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ini meliputi peningkatan akses jalan(170m) dan dreinase(160m) Tahun 2017 dengan total anggaran Rp 196.935.000 dengan yang menerima manfaat langsung (371 jiwa) tidak langsung (618 jiwa) dengan tujuan program Kotaku yaitu bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar guna mendukung terwujudnya pemukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Serta, manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitarnya. Item penilaian dari indikator dampak kebijaksanaan terhadap situasi atau orang-orang(kelompok) yang bukan jadi sasaran/tujuan utama yaitu:

- a. **Tersedianya sumber-sumber yang terbatas seperti tenaga, biaya, material, waktu dan sebagainya**

Program-program yang hadir dalam kegiatan KOTAKU berjalan berkesinambungan satu sama lain. Perencanaan yang dilakukan dimulai dari masyarakat, karena masyarakat lah yang sangat paham akan permasalahan serta kebutuhan mereka di masing-masing. Keterlibatan semua unsur dalam perencanaan yang dilakukan dapat dengan jelas mencerminkan kondisi satu wilayah.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai manfaat yang diterima langsung oleh masyarakat maka peneliti melakukan wawancara kepada Bapak **Zumaidi**

selaku ketua Koordinator BKM dan juga sekaligus sebagai RW 04 Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis beliau menjelaskan:

*“kalau yang dirasakan ya mungkinlah lebih bersih dari yang sebelumnya, hasil yang telah dicapaipun adanya perubahan terhadap lingkungan permukiman masyarakat, kondisi sosial masyarakat, dan kondisi perekonomian masyarakat. Dari segi lingkungan, kelurahan Duri Barat bukan lagi termasuk dalam permukiman kumuh tetapi telah memasuki permukiman layak huni. Dari segi sosial, kualitas hidup masyarakat tidak lagi rendah, dan dari segi ekonomi, masyarakat mengalami perubahan karena selain Program Kotaku bertujuan untuk merubah lingkungan kumuh menjadi perumahan layak huni juga memberdayakan masyarakat agar dapat hidup mandiri”*

*(Wawancara, Minggu, 20 Februari 2022, Pukul 17.03 Wib)*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu **Marlini** beliau mengatakan:

*“ya cukup nyamanlah, tentram, jalan dah bagus gini kan udah cukup puas dan terpenuhi lah menurut saya dari program yang sudah diberikan oleh pemerintah ini”*

*(Wawancara, Kamis, 24 Februari 2022, Pukul 14.36 Wib)*

Kemudian peneliti menanyakan pertanyaan yang sama kepada Ibu **Nurul** beliau menjelaskan bahwa:

*“untuk sekarang puas, mana tau ada lagi kan mungkin malah makin puas rasanya, tapi parit dibelakang rumah roboh dan belum diperbaiki, ntah ga masuk programnya ntah gimana ga tau jugakan, soalnya waktu lagi pembuatan tengki air ini waktu lagi dibangun Covid-19 datang kan jadi ga tau gimana tu kondisinya”*

*(Wawancara, Kamis, 24 Februari 2022, Pukul 14.36 Wib)*

Berdasarkan wawancara diatas yang peneliti lakukan mengenai indikator dampak kebijakan yang tidak diharapkan yang terdiri dari sub indikator tersedianya sumber-sumber yang terbatas seperti tenaga, biaya, material, waktu dan sebagainya peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam kegiatan program

KOTAKU di Kelurahan Duri Barat ini sudah banyak masyarakat yang merasakan langsung manfaatnya. Pencapaian yang telah didapatkan yaitu adanya perubahan permukiman masyarakat yang dulunya permukiman kumuh yang tidak layak huni kini menjadi permukiman layak huni. Namun dalam perbaikan drainase mungkin belum terlaksana dengan baik dan hanya di beberapa tempat saja yang dibangun sehingga sebagian warga yang dreinasenya belum diperbaiki yang merasakan bau tidak enak di belakang rumah mereka akibat sampah yang menumpuk dan air yang tergenang.

Permasalahan terhadap saluran drainase lingkungan tersebut sesuai dengan apa yang telah didefinisikan oleh Prayitno (2014) bahwa ciri dan karakteristik kekumuhan dalam kawasan permukiman kumuh diantaranya kurangnya pelayanan dasar, dalam hal ini tidak memiliki akses terhadap pelayanan dasar seperti fasilitas sanitasi, sumber air bersih, sistem pengumpulan atau pengelolaan sampah, jaringan listrik dan drainase. Sementara Masrun (2009) mengemukakan bahwa permukiman kumuh memiliki ciri-ciri tidak memadainya kondisi sarana dan prasarana dasar, seperti halnya air bersih, jalan, drainase, sanitasi, listrik, fasilitas pendidikan, ruang terbuka/rekreasi, fasilitas pelayanan kesehatan.

Selanjutnya Acharya (2010) mendefinisikan kawasan kumuh sebagai hunian yang tidak memadai karena tidak adanya ketersediaan fasilitas fisik (RTH, drainase, air bersih, jaringan komunikasi, dll). Permasalahan ini juga senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sinulingga (2005) bahwa ciri-ciri permukiman kumuh juga mengindikasikan fasilitas drainase sangat tidak memadai dan malahan bisa terdapat jalan-jalan tanpa drainase, sehingga apabila hujan

kawasan ini dengan mudah akan tergenang air, dreinase di sebagian wilayah kawasan kumuh juga dalam keadaan kondisi rusak, tersumbat oleh sampah, serta mengalami penyempitan akibat sedimentasi lumpur, tanah dan sampah mengakibatkan saluran tidak dapat berfungsi secara maksimal.

Dalam sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai landasan hukum harus dapat memberikan manfaat dan juga dampak positif sehingga merubah suatu kebijakan tersebut kearah yang lebih baik dari hasil pelaksanaannya. Kebijakan tentunya adalah upaya dari pemerintahan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Kelompok pemanfaatan dan pemeliharaan pada program kota tanpa kumuh (kotaku) merupakan upaya untuk menjamin keberlanjutan infrastruktur yang dibangun agar agar senantiasa dapat dimanfaatkan dan mampu menjaga kualitas lingkungan pemukiman menjadi tidak kumuh kembali, dengan cara menggunakan prasarana dan sarana sesuai dengan fungsinya untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dilingkungannya. Selain itu peran kelompok pemanfaatan dan pemeliharaan diharapkan dapat menjaga agar prasarana dan sarana yang dibangun atau telah ada agar berfungsi sesuai fungsinya dan memiliki umur pemakaian lebih lama.

Oleh karena itu kelompok pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana, penggerak masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dalam mewujudkan lingkungan yang bebas kumuh. Jadi solusi kehadiran kelompok pemanfaatan dan pemeliharaan dinilai amat penting untuk mencegah masalah yang mungkin muncul akibat sistem pengelolaan infrastruktur yang buruk. Disisi lain, kehadiran

kelompok pemanfaatan dan pemeliharaan tentu saja untuk membangun kesadaran warga menyoal pentingnya memelihara sarana dan prasarana yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan dengan baik secara berkelanjutan.

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (kotaku) di Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ini dimana tujuan dari program ini adalah menurunkan kualitas kekumuhan, memberdayakan masyarakat miskin, membentuk kelompok kerja perumahan, telaksananya hidup bersama, dan tersusunya rencana penanganan permukiman kumuh dengan melihat kondisi kelurahan Duri Barat yang keberadaanya terlalu sempit dan bangunan rumah yang tidak teratur menjadi penyebab daerah ini rentan banjir serta minimnya sarana dan prasarana permukiman yang berdampak rendahnya kualitas hidup masyarakat. Sehingga mendorong pemerintah untuk mewujudkan permukiman layak huni di kelurahan ini. Dengan demikian program KOTAKU dapat menjadikan Kelurahan Duri Barat ini menjadi layak huni

Pada dampak kebijaksanaan berpengaruh pada kondisi ini evaluasi kebijakan publik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses kebijakan publik. Sebagai sebuah kegiatan pengumpulan, penganalisan, dan penilaian mengenai akibat dan konsekuensi kebijakan publik, evaluasi kebijakan publik bertujuan untuk memberikan informasi mengenai keberhasilan sebuah program kota tanpa kumuh (kotaku) dan dampak apa yang diakibatkan oleh program tersebut. Evaluasi kebijakan publik harus mampu memberikan pertimbangan kepada pengambilan kebijakan dalam memutuskan apakah

program/kebijakan tersebut layak untuk diteruskan ataukah perlu pembenahan atau bahkan harus dberhentikan.

**Gambar V.1 Kondisi Jalan dan Dreinase**



**Sumber : Dokumentasi yang diolah peneliti, 02 Februari 2022**

Dampak kebijakan pengembangan program KOTAKU Kelurahan Duri Barat pada kondisi sekarang terlihat dalam penataan pembangunan jalan dan dreinase yang mana masih terdapatnya jalan yang rusak dan berlobang dan parit yang sempit juga banyaknya sampah yang menumpuk didalamnya sehingga menyebabkan banjir. Sedangkan dampak yang berpengaruh pada kondisi yang akan datang pastinya akan membawa dampak buruk yang lebih parah lagi dimana kurangnya tingkat kepedulian dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Item penilaian dari indikator dampak kebijaksanaan berpengaruh pada kondisi sekarang atau kondisi yang akan datang adalah:

- b. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pembangunan dalam menjaga fasilitas infrastruktur yang dibangun**

Peningkatan kualitas hidup penduduk adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya mulai dari segi ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, kesehatan, dan dari segi yang lainnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas hidup merupakan perasaan subjektif seseorang mengenai kesejahteraan dirinya, berdasarkan pengalaman hidupnya saat ini secara keseluruhan. Kualitas hidup menggambarkan pencapaian kehidupan manusia yang ideal atau sesuai dengan yang diinginkan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas kehidupan bermasyarakat dalam program KOTAKU Kelurahan Duri Barat ini maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Zumaidi selaku ketua Koordinator BKM dan juga sekaligus sebagai RW 04 Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis beliau memberikan tanggapan sebagai berikut:

*“itu ada timnya lagi namanya KSM, tim perawatan itu ada, Cuma sekarang lebih cenderung perawatan itu dari masyarakat sekitar kayak disinikan yang masyarakat sini gitu, memang ada kemaren kita tunjuk itu beberapa orang kan tapi mungkin ya karena kegiatan mereka padat gitukan, jadi kita serahkan kalau ada yang kotor-kotor kita intruksikan aja ke masyarakatnya langsung, dulu ada timnya tapi ya pada sibuk mungkin sekarang jadi ga terprihatiin lagi”*

*(Wawancara, Minggu, 20 Februari 2022, Pukul 17.03 Wib)*

Selanjutnya peneliti sudah melakukan wawancara dengan Ibu **Herni** sebagai salah satu warga yang berada di Kelurahan Duri Barat beliau mengatakan:

*“saya rasa program ini tu bagus karena di dalamnya sama-sama ingin memajukan kualitas hidup bermasyarakat menuju yang lebih baik dengan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur yang diberikan kepada masyarakat kayak kami gini sebagai masyarakatnya, sama-sama menjaga lingkungan yang tadinya kotor sekarang sudah bersih”*

*(Wawancara, Kamis, 24 Februari 2022, Pukul 14.36 Wib)*



Kemudian peneliti menanyakan pertanyaan yang sama kepada Ibu **Nurul** beliau menjelaskan bahwa:

*“iya bagus lah mbak kan lingkungan yang dulunya kotor sekarang sudah bersih, saya yang tinggal disini aja jadi nyaman, tidak ada sampah yang berserakan, biasanya ada tumpukan sampah disini mbak, sekarang udah ga ada lagi, jadi saya pun berinisiatif juga membuang sampah langsung kepasar aja, kan sayang kalau harus di tumpuk lagi di dekat tembok rumah ini, baunya lagi yang ga enak”*  
(Wawancara, Kamis, 24 Februari 2022, Pukul 14,36 Wib)

Berdasarkan kutipan wawancara dengan key informan dan informan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam kegiatan program kotakku ini belum terlaksana secara maksimal, dimana pada salah satu pertumbuhannya tidak terencana sehingga penampilan fisiknyapun tidak teratur dan terurus (dalam hal bangunan, halaman, dan jalan-jalan), serta sempitnya ruang antar bangunan dan tidak ada ruang terbuka sama sekali. Permukiman tersebut dihuni oleh penduduk yang padat, karena adanya pertumbuhan penduduk alamiah maupun migrasi yang tinggi dari pedesaan.

Dalam wawancara diatas peneliti melihat program KOTAKU ini infrastruktur yang dibangun masih kurang optimal. Karena ada sebagian warga yang masih merasa terganggu akibat belum terlaksananya perbaikan dreinase dibelakang rumahnya sehingga mengeluarkan bau yang tidak enak akibat tumpukan sampah yang tersumbat dan tidak dapat mengalirkan air hujan dengan cepat sehingga menimbulkan genangan air walaupun hujan yang lebat sekalipun didalamnya dan untuk perbaikan jalan sendiripun juga masih banyak terdapatnya jalan yang berlobang.

Kualitas hidup berkaitan dengan pencapaian kehidupan manusia yang ideal atau sesuai dengan yang diinginkan (Diener dan Suh, dalam Nofitri, 2009) World Health Organization (WHO) (dalam Kwan, 2000) mendefenisikan kualitas hidup sebagai persepsi individu mengenai posisi mereka dalam kehidupan dilihat dari konteks budaya dan sistem nilai dimana mereka tinggal serta hubungannya dengan tujuan, harapan, standar, dan hal-hal lain yang menjadi perhatian individu tersebut.

Terkait peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat dalam program kota tanpa kumuh (kotaku) di Kelurahan Duri Barat ini seseorang dengan adanya program ini merasa sejahtera, lebih mudah, lebih nyaman dan juga sangat terbantu dalam kegiatan sehari-harinya dari segi infrastruktur yang dibangun juga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dan bangunan yang tertata rapi dengan tidak adanya lagi sampah berserakan yang menimbulkan keresahan bagi warga setempat.

### **C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) DiKelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis**

Yang menjadi hambatan Evaluasi Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) diKelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

1. Tersedianya sumber-sumber yang terbatas seperti tenaga, biaya, meterial, waktu dan sebagainya

2. Permukiman yang padat penduduk yang menyebabkan sulitnya merubah permukiman kumuh tersebut menjadi bersih, nyaman, asri dan lain sebagainya.
3. Pada saat program Kotaku yang sudah berjalan dengan baik maka masyarakat dapat merasakan manfaatnya, mulai dari keadaan lingkungan yang rapih dan bersih, aman, harmonis dan berkelanjutan.
4. Kurang pahamiannya masyarakat akan manfaat dari sebuah program KOTAKU yang baik dan kurang tanggapnya masyarakat terhadap maslaah-masalah yang terjadi pada lingkungan sendiri.
5. Melihat kondisi sosial masyarakat di kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Duri Barat ini, perlu sekiranya dilakukan upaya, berupa sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa program Kotaku ini sudah cukup sukses berjalan dikarenakan sudah ada hasilnya yaitu tingkat kawasan kumuh yang semakin berkurang dari tahun ke tahun secara bertahap.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan dilapangan dapat diketahui bahwa dampak program Kota Tanpa Kumuh (kotaku) ini merupakan salah satu program yang telah dilaksanakan di Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dimana untuk mengatasi masalah permukiman kumuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas permukiman yang diwujudkan secara menyeluruh. Kemudian ada juga beberapa infrastruktur yang dibangun belum sepenuhnya merata sebab masih terdapatnya dreinase yang kecil dan terdapat sampah yang menumpuk di dalamnya dan juga pembangunan jalan yang ternyata masih adanya terdapat lobang-lobang yang dapat membahayakan kendaraan seperti motor yang melaluinya.

Untuk faktor penghambat berasal dari masyarakat itu sendiri dimana masih ada masyarakat yang kurang menjaga proyek-proyek yang sudah di laksanakan. Dalam faktor pendukung ini berasal dari masyarakat bahwasanya masih ada kesadaran masyarakat yang berinisiatif untuk memperbaiki lingkungannya sendiri sehingga secara tidak langsung nantinya demi kenyamanan masyarakat itu sendiri.

Selanjutnya informasi yang diberikan oleh masyarakat setempat mengenai dampak yang mereka rasakan secara langsung mengenai program kotaku yang telah diberikan oleh pemerintah ini ada yang berdampak positif maupun negatif.

Salah satunya ternyata fasilitas disini tidak seluruhnya masyarakat yang merasakannya seperti yang dikatakan salah satu warga Kelurahan Duri Barat mengenai dreinase yang kecil dan tidak cukup untuk menampung air apa bila terjadinya hujan sehingga menyebabkan banjir yang meluap sampai masuk ke dalam rumah salah satu warga tersebut.

Namun ini salah satu bentuk sosial kapital yang semakin baik dalam masyarakat dengan meningkatnya kebersamaan masyarakat diharap kedepan proses-proses pembangunan lainnya di bidang-bidang lainnya agar bisa jauh lebih mudah untuk dilakukan karena sudah terwujud adanya kebersamaan dari masyarakat dan itu adalah dampak dari keberadaan program kota tanpa kumuh (kotaku) di Kelurahan Duri Barat.

#### **B. Saran**

1. Program Kotaku Kelurahan Duri Barat dalam pembangun infrastruktur dan lingkungan kumuh dapat memperhatikan juga tingkat kesadaran masyarakat miskin dalam meningkatkan lingkungan sehat bersih tanpa kumuh untuk dapat melakukan pendekatan sosialisasi mengenai lingkungan. Bagaimana menjaga lingkungan, menjaga saran prasarana, sarana air bersih dan lain sebagainya.
2. Komunikasi antar pemangku kepentingan, masyarakat dan aparat kelurahan haruslah saling terjaga karen masyarakatlah yang pada dasarnya mengetahui masalah apa saja yang terjadi dilungkungan mereka masing-masing.

3. Mengadakan rapat terkait program KOTAKU pada waktu yang dikiranya memungkinkan untuk seluruh masyarakat sekitarnya, terkait agar dapat hadir dalam mengevaluasi dan menjaga lingkungan sekitarnya agar selalu bersih, aman dan nyaman.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku

Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa  
Edisi Revisi. 2013. Pekanbaru UIR Press.

Budi Winarno, 2007. *Kebijakan PublikI: teori dan proses*, (Edisi Revisi), Yogyakarta:Media Pressindo,ISBN-979-222-207-3

Budi Winarno, 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*.  
Yogyakarta: CAPS.

Hasibuan, Melayu S.P, 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, PT.  
Bumi Aksara (Revisi Kelima)

Ndraha Talliziduhu. 2003. *Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru 1*. Jakarta.  
Rineka Cipta

Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung:Alfabeta.

Bingham, Richard D. 2002. *Evaluation in Practice A Methodological Approach*.  
Second Edition

Siagain, Sondang P,2003.*Filsafat Administrasi*. Jakarta, Bumi Aksara

Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Kepemimpinan Pemerintah Indonesia*. Bandung:  
Refika Aditama

Thoha, Miftah, 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Yogyakarta,  
Kencana.

Yussa Tarmizi dan Andry Hendry. 2015. *Prilaku Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh

Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.

**Jurnal Penelitian/Artikel Ilmiah/Dokumen:**

Aisyahwati, V. F. 2018. Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Upayapenanganan Kawasan Kumuh (Studi Pada Badan Keswadayaan Masyarakat (Bkm) Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang). Universitas Brawijaya.

Fidianigrum, Y., Hermawan & Sukanto. Evaluasi Dampak Kebijakan Pengembangan Terminal Kertosono (Studi Pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 1(2). pp. 317-324.

Ilham,moh. 2020. Evaluasi pelaksanaan program kota tanpa kumuh (kotaku) di desa sayang kecamatan jatinangor kabupaten sumedang provinsi jawa barat

Irma. 2019. Evaluasi Tata Kelola Program Kota Tanpa Kumuh “Kotaku” Di Kota Makassar (Studi Kasus Kelurahan Parang Tambung). Universitas Muhammadiyah Makassar.

Najillah. 2021. Evaluasi partisipasi masyarakat dalam program kotaku di kota manado



Ratika, Nur. 2020. Evaluasi Penanganan Permukiman Kumuh (Studi Pada Penanganan Program Kotaku Kelurahan Banggae Kabupaten Majene)

Sundari, Siti. 2020. Evaluasi program kota tanpa kumuh oleh dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup kabupaten Ciamis

Stevanie. 2019. Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan. Universitas Sumatera Utara.

Utami, F. W. P. 2011. Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin Di Rusunawa Pekunden Kota Semarang. Universitas Negeri Semarang.

**Undang-undang:**

Keputusan Bupati Bengkalis Nomor:341/KPTS/X/2014. Tentang Lokasi Kawasan Pemukiman Kumuh Perkotaan Di Kabupaten Bengkalis

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

<https://bengkaliskab.go.id/view/info/visi-dan-misi#:~:text=Mewujudkan%20Reformasi%20Birokrasi%20serta%20Penguatan,Wilayah%20Perbatasan%20untuk%20Kesejahteraan%20Rakyat>